



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019 - 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2023**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan. Perencanaan Strategis berfungsi sebagai sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis menjadi petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5 tahun ke depan.

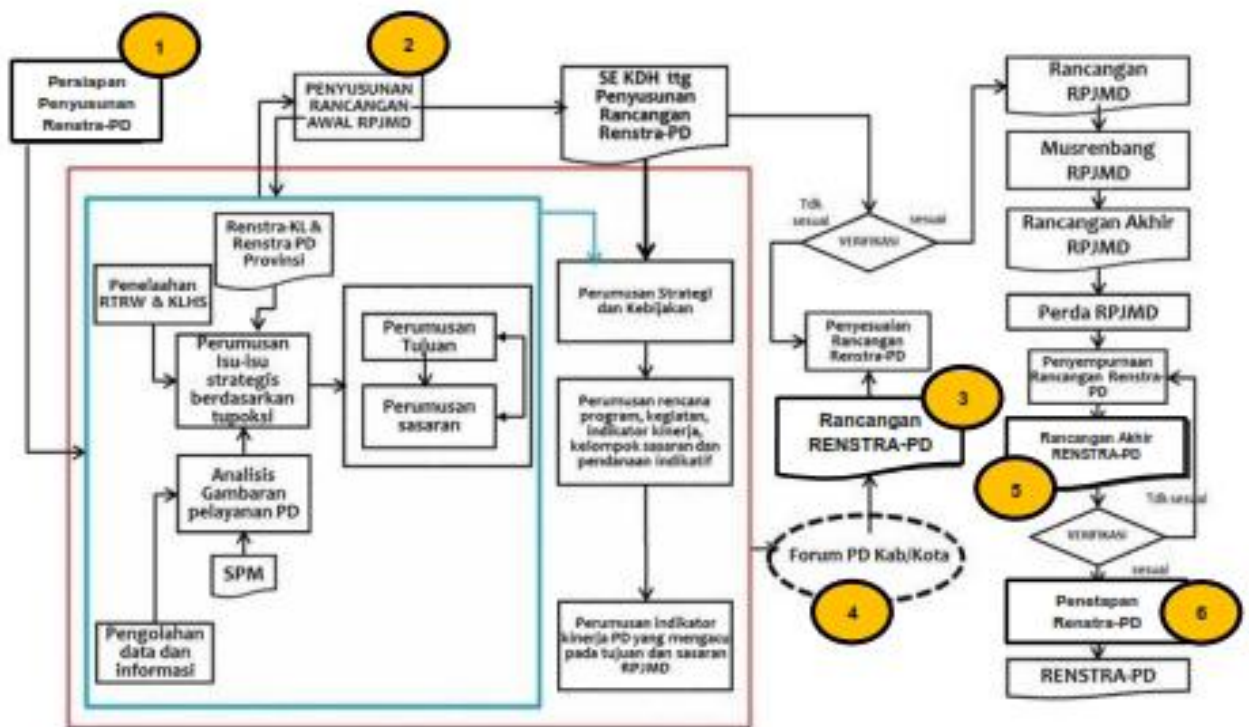
Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, hal ini dikarenakan Renstra merupakan penjabaran dari rencana pembangunan yang telah tercantum dalam RPJMD. Disamping mengacu kepada RPJMD yang telah ditetapkan, Renstra juga harus mengintegrasikan dengan rencana tataruang dan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan kondisi baik itu di tingkat lokal, regional maupun nasional. Kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pada periode sebelumnya juga harus tetap diperhatikan dalam penyusunannya.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang merupakan salah satu wujud operasional dari Visi, Misi Kepala Daerah dan strategi Disporabudpar Kabupaten Sampang yang akan dijalankan oleh empat unit bidang kerja yaitu Bidang Pemuda dan olahraga, Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata, dan Bidang Ekonomi Kreatif akan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang

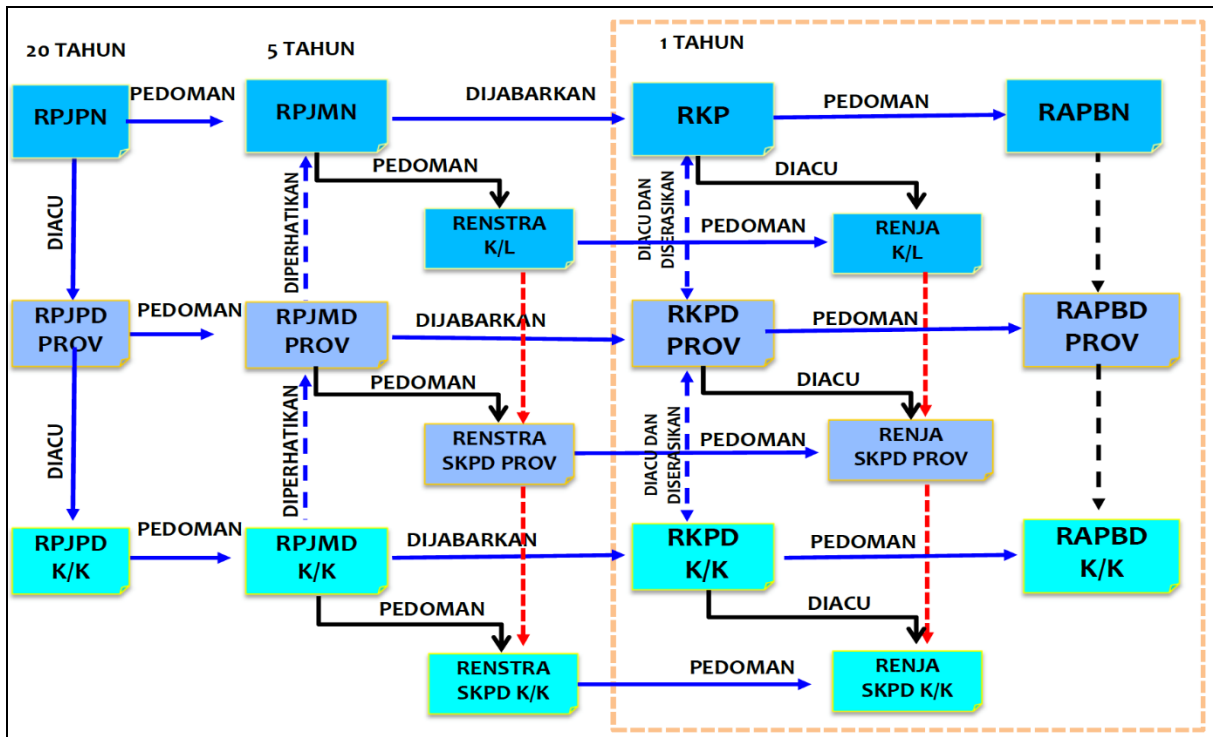
merupakan penjabaran dari RPJP Kabupaten Sampang yang akan digunakan Disporabudpar Kabupaten Sampang sebagai acuan kerja 5 tahun ke depan.

Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang disusun melalui tahapan atau proses Persiapan Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dan Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Dengan adanya Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang maka upaya untuk mengukur kinerja baik ditingkat sasaran (dampak/impact), Program Hasil (outcome) dan di tingkat Kegiatan (keluaran/ output) secara terukur dapat terlaksana.



Gambar 1.1
Tahapan dan Tata Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan berikut ini :



Sumber : Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

Gambar 1.2
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

Pada Tahun 2019 Kabupaten Sampang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampng Tahun 2019-2024, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Namun sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD 2019-2024, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka pada tahun 2021 dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dan pada tahun 2023 dilakukan perubahan kembali dari hasil penajaman Kemanpan RB.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daaerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Merujuk pada Pasal 342, disebutkan bahwa perubahan RPJMD dilakukan dengan memperhatikan persyaratan pada Pasal 342 Ayat 1, efektivitas waktu perubahan pada Pasal 342 Ayat 2, serta kategorisasi dari perubahan yang mendasar dalam rangka perubahan

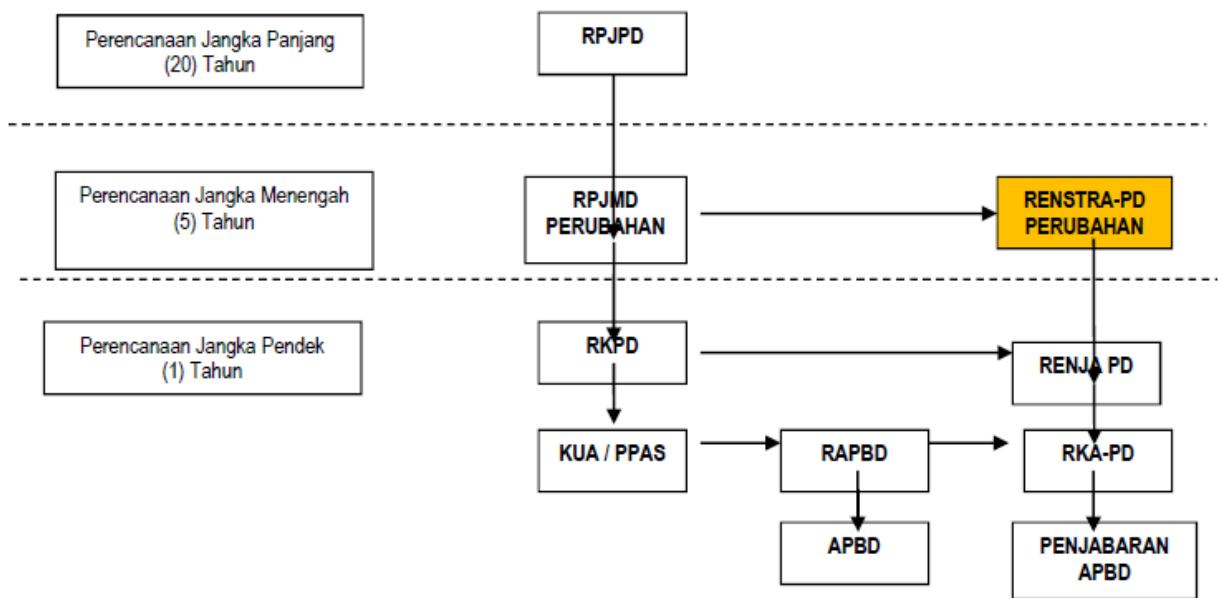
RPJMD pada Pasal 342 Ayat 3. Kabupaten Sampang dalam melakukan perubahan RPJMD telah memenuhi ketentuan yang dimaksud, yaitu masa berlaku RPJMD Kabupaten Sampang masih lebih dari 3 (tiga) tahun, serta berbagai alasan yang mendasar, diantaranya :

1. Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sampang dengan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur, serta perencanaan pembangunan Nasional dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
2. Penyesuaian perencanaan daerah akibat adanya bencana nasional non-alam yaitu Pandemi Covid-19, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang untuk melakukan *realocation* dan *refocusing* penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tentunya berimbas pada penentuan kembali target dan indikator tujuan, sasaran maupun program yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.
3. Penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah akibat terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga perlu penyesuaian nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah serta desain kelembagaan daerah.
4. Penyelarasan tata cara penyusunan dan substansi rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan mempertimbangkan isu-isu pembangunan yang aktual.

Terkait Perubahan RPJMD tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4) mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Renstra di Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Selain hal tersebut di atas, Perubahan Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang juga menyesuaikan nomenklatur terkini yang mana membawa dampak adanya perubahan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Disporabudpar Kabupaten Sampang dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sampang, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang.

Keterkaitan antara Dokumen Perubahan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1.3
Keterkaitan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dari gambar tersebut di atas, nampak Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan untuk skala periode 5 (lima) tahunan atau sama dengan Dokumen Perencanaan Tingkat Kabupaten yaitu RPJMD dan RKPd, sehingga memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Dalam Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah tersebut, maka yang menjadi pedomannya adalah Dokumen Perubahan RPJMD dimana semua yang terkait visi dan misi, kebijakan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menindaklanjutinya, disamping itu Renstra dari Kementrian juga bisa dijadikan pedoman untuk menindaklanjuti kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat yang harus segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Teknis di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra perlu mengembangkan hubungan di antara peraturan dan perundangan tersebut sehingga Perubahan Renstra sebagai

dokumen rencana jangka menengah mudah diterjemahkan ke dalam rencana tahunan RKP, KUA APBD, Renja OPD, RKA-OPD, dan APBD. Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Perubahan Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang khususnya dan perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya Tahun 2019-2024, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perlindungan Benda Cagar Budaya;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;

30. Peraturan Bupati Sampang Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang;
31. Berita Acara Bupati Sampang Nomor 050/377/434.301/2022 tentang Penajaman Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 ini dimaksudkan untuk :

- 1) Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dalam RPJMD dan Penetapan Perubahan Indikator RPJMD yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan;
- 2) Disusun sebagai acuan resmi bagi Disporabudpar Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kinerja tiap tahunnya;
- 3) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan Disporabudpar Kabupaten Sampang periode 2019-2024;
- 4) Menjadi acuan kepentingan dalam upaya memajukan pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Sampang;
- 5) Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan dari penyusunan perubahan Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang sebagai perumusan pelaksanaan visi dan misi Disporabudpar Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kinerja (*performance plan*);
- 2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran selama empat tahun ke depan (*workplan and budget*);
- 3) Menyusun penetapan kinerja (*performance agreement*);
- 4) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Disporabudpar Kabupaten Sampang;
- 5) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi; serta
- 6) Menetapkan instrument untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang,

Dalam pelaksanaan tugasnya Disporabudpar Kabupaten Sampang terdiri dari Sekretariat dan empat bidang kerja yang terdiri dari Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata, dan Bidang Ekonomi Kreatif. Yang pada masing masing bidang mempunyai tupoksi sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.
2. Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga serta sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
3. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan urusan sarana prasarana kebudayaan, pembinaan adat dan pengelolaan cagar budaya, kepurbakalaan dan permuseuman, pemberdayaan seni dan budaya, pelestarian sejarah nilai tradisional dan kelembagaan budaya.
4. Bidang Pariwisata mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program kegiatan kepariwisataan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, sumberdaya dan kelembagaan pariwisata industri dan investasi, pemasaran dan data informasi;
5. Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan, ekonomi digital dan produk bidang ekonomi kreatif.

Selain hal hal diatas jenis-jenis pelayanan yang menjadi kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

1. Pendirian Organisasi Kesenian Masyarakat
2. Rekomendasi Ijin Pentas Organisasi Kesenian Masyarakat
3. Sewa Sarana dan Prasarana Olahraga merujuk Perda Nomor 6 Tahun 2011 dan Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha

4. Rekomendasi Ijin Usaha Pariwisata merujuk Permenpar Nomor 18 Tahun 2016 dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Sektor Pariwisata.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah :

1) Kedudukan

- » Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Bidang Kebudayaan dan Bidang Pariwisata.
- » Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

2) Tugas Pokok

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Bidang Kebudayaan dan Bidang Pariwisata serta tugas pembantuan.

3) Fungsi

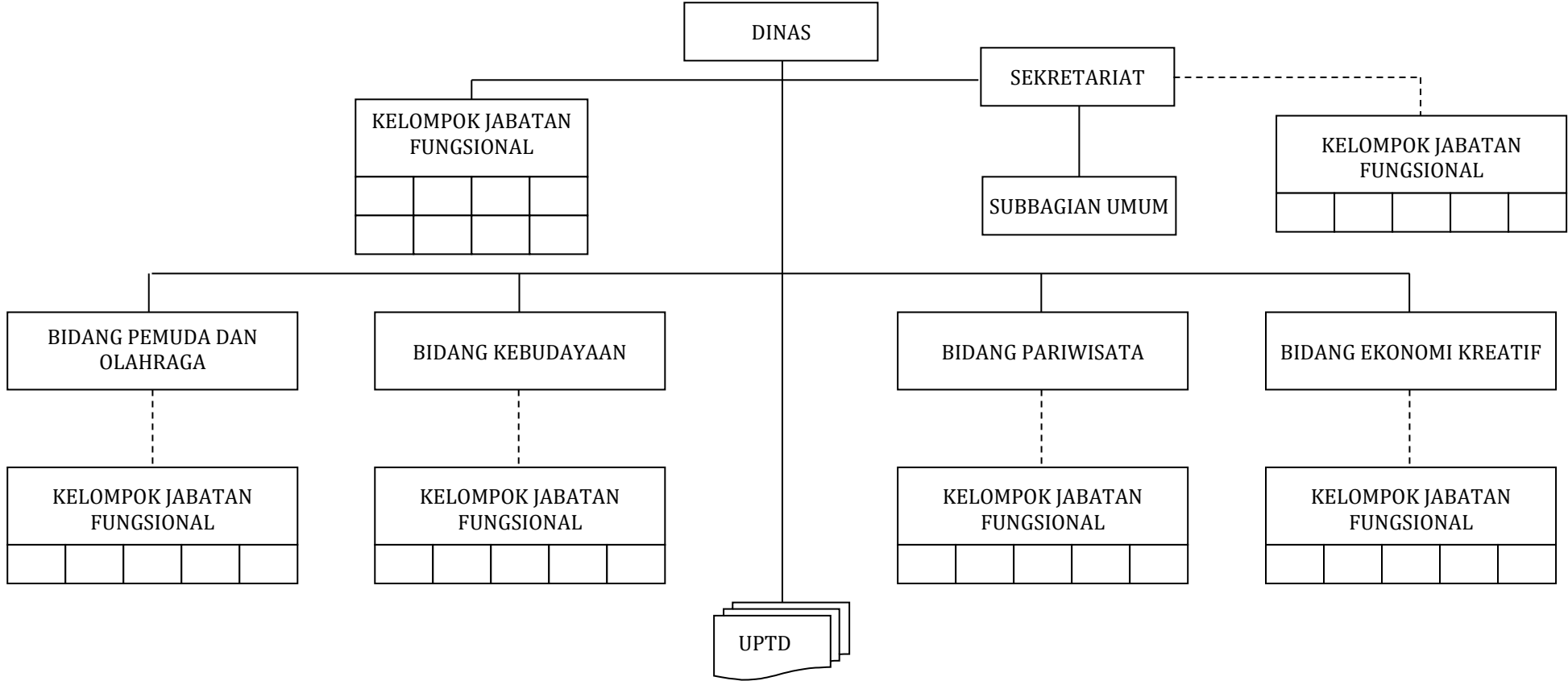
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif;
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

4) Susunan Organisasi

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Lampiran : PERATURAN BUPATI SAMPANG
Nomor 114 Tahun 2022
Tanggal 30 Desember 2022



Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2023

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Disporabudpar Kabupaten Sampang

1. Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 - c. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - d. Bidang Kebudayaan;
 - e. Bidang Pariwisata;
 - f. Bidang Ekonomi Kreatif;
 - g. UPTD Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
4. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Tugas dan Fungsi

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yudisial*);

- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- d. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- f. Membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (*non yudisial*);
- g. Menyiapkan vahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- h. Menyiapkan vahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pemuda dan Olahraga serta sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Menyusun bahan pelaksanaan pendataan potensi pemuda dan bahan pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan promosi pengembangan kapasitas kepeloporan pemuda dalam pembangunan serta melaksanakan pameran pemuda dan sentra kewirausahaan pemuda;
- c. Menyiapkan bahan pengkaderan pendidikan kesadaran belanegara dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pendampingan dan fasilitas akses permodalan serta pengembangan sentra kewirausahaan pemuda;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan pengaruh destruktif terhadap bahaya narkoba, psikotropika, zataditif, pergaulan bebas, HIV/AIDS pornografi

dan porno aksi, prostitusi, perdagangan manusia dan penurunan kualitas moral kepada pemuda;

- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda melalui program pertukaran pemuda dan jambore pemuda;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan peningkatan kesadaran lingkungan dan fasilitas peningkatan pendidikan kepemudaan dan kepramukaan;
- g. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise pembinaan dan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
- h. Merencanakan, memenuhi kebutuhan dan memelihara sarana dan prasarana bidang kepemudaan dan olahraga;
- i. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan, menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan Keolahragaan di sekolah dan di masyarakat;
- j. Melaksanakan pembinaan, pengembangan keahlian tenaga tehnis dan memfasilitasi pengembangan olahraga tradisional;
- k. Melaksanakan peningkatan kebugaran bagi anak usia dini, pelajar dan masyarakat;
- l. Melaksanakan kompetisi olahraga bagi pelajar dan masyarakat;
- m. Merencanakan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- n. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi sarana dan prasarana olahraga;
- o. Merencanakan, memenuhi kebutuhan dan memelihara sarana dan prasarana Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- p. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan urusan sarana prasarana kebudayaan, pembinaan adat dan pengelolaan cagar budaya, kepurbakalaan dan permuseuman, pemberdayaan seni dan budaya, pelestarian sejarah nilai tradisional dan kelembagaan budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, pengkoordinasian, evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan program kegiatan peningkatan sarana prasarana kebudayaan, pengelolaan cagar budaya dan pengelolaan permuseuman;

- b. Penyusunan, pengkoordinasian, evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pelestarian dan pemberdayaan seni dan budaya;
- c. Penyusunan, pengkoordinasian, evaluasi dan monitoring serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pelestarian sejarah nilai tradisional dan kelembagaan budaya;
- d. Menyusun data, kajian, rekomendasi, penetapan dan pemanfaatan sarana prasarana kebudayaan, benda cagar budaya, adat istiadat lokal, seni dan tradisi budaya daerah;
- e. Melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan dan pelestarian sarana prasarana kebudayaan, benda cagar budaya, seni budaya dan nilai tradisi budaya daerah;
- f. Melaksanakan revitalisasi benda cagar budaya milik pemerintah daerah dan non pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya;
- g. Melaksanakan penerbitan nomor induk kesenian dan, rekomendasi pementa sani terkait nilai budaya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program kegiatan kepariwisataan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, sumberdaya dan kelembagaan pariwisata industri dan investasi, pemasaran dan data informasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, sumberdaya dan kelembagaan pariwisata, industri dan investasi, pemasaran dan data informasi;
- b. Perumusan rencana kerja kebijakan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, sumberdaya dan kelembagaan pariwisata, industri dan investasi, pemasaran dan data informasi;
- c. Pelaksana pengembangan kebijakan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata, sumberdaya dan kelembagaan pariwisata industri dan investasi, pemasaran dan data informasi;
- d. Pelaksanaan pemetaan dan pendataan komponen potensi daya tarik wisata dan destinasi wisata, potensi sumberdaya pariwisata dan kelembagaan pariwisata,

- potensi dan perkembangan industri dan peluang investasi, potensi dan pergerakan pasar wisatawan;
- e. Penyusunan kajian terkait daya tarik pariwisata dan kawasan strategis pariwisata kabupaten dan analisa pasar wisatawan;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata;
 - g. Pelaksanaan pendampingan sumberdaya wisata dan kelembagaan;
 - h. Pelaksana kegiatan pemasaran, promosi langsung, promosi digital, iklan, penyebaran informasi, pencitraan merek (*branding*), dan bentuk pemasaran/promosi lainnya;
 - i. Pelaksanaan pengembangan event dan *meeting, incentive, convention and exhibition (mice)*, serta industri pariwisata lainnya sesuai dengan trend perkembangan wisata;
 - j. Pengembangan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dalam peningkatan pemasaran dan kelembagaan pariwisata;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi pemasaran pariwisata bagi para pelaku usaha pariwisata;
 - l. Pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan fasilitasi perijinan dan sertifikasi sumberdaya pariwisata;
 - m. Pelaksanaan pariwisata berkelanjutan;
 - n. Pelaksana tanggap darurat kepariwisataan;
 - o. Penyusunan rekomendasi sektor kepariwisataan;
 - p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata; dan
 - q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Ekonomi Kreatif

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan, ekonomi digital dan produk bidang ekonomi kreatif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan, ekonomi digital dan produk bidang ekonomi kreatif;
- b. Pelaksanaan pemetaan dan pendataan kelembagaan, ekonomi digital dan produk bidang ekonomi kreatif;
- c. Pelaksanaan kajian dan riset pengembangan dan pergerakan ekonomi kreatif;

- d. Pelaksanaan kegiatan pemasaran ekonomi digital dan produk bidang ekonomi kreatif;
- e. Pelaksanaan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dalam peningkatan pengembangan ekonomi digital dan ekonomi kreatif;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif;
- g. Pelaksanaan fasilitasi standarisasi, sertifikasi dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pelaku ekonomi kreatif;
- h. Pelaksanaan fasilitasi, konsultasi, pembimbingan dan pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif;
- i. Pelaksanaan fasilitasi perlindungan produk dan kekayaan intelektual bagi para pelaku ekonomi kreatif;
- j. Penyusunan rekomendasi bidang ekonomi kreatif;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ekonomi Kreatif; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pembentukan UPTD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pelayanan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sebagai berikut :

- a. Pejabat fungsional jenjang pertama yang ditempatkan di Sekretariat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional;
- b. Pejabat fungsional jenjang muda yang ditempatkan di Sekretariat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- c. Pejabat fungsional jenjang pertama dan jenjang muda yang ditempatkan di Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional; dan
- d. Pejabat fungsional jenjang madya dan jenjang utama berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Dinas/Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian dengan penugasan yang diberikan melalui Keputusan Kepala Dinas. Pelaksanaan tugas pokok dan tugas tambahan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara perorangan dan/atau kelompok.

Pelaksanaan tugas secara kelompok dilaksanakan melalui pembentukan Tim, Satuan Tugas dan/atau Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas. Dalam hal pejabat fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan, pejabat fungsional tersebut dapat membawahi pejabat fungsional dan pelaksana.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Personel Disporabudpar Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural, jabatan fungsional dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Disporabudpar Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
(Posisi Per 31 Januari 2023)

No	Status Pegawai	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri Sipil / PNS	26	20	6
2	Calon Pegawai Negeri Sipil/ CPNS	0	0	0
3	Honor Daerah / Honda	8	5	3
4	Tenaga Kontrak / Magang	41	29	12
	Jumlah Pegawai	75	54	21

Sumber : Subag Umum Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2023

Berdasarkan status pegawai jumlah PNS 26 orang atau sebesar 34,67% dari seluruh jumlah pegawai, jumlah Honda 8 orang atau 10,67% dari seluruh jumlah pegawai, jumlah tenaga kontrak / magang 41 orang atau 54,67% dari jumlah seluruh pegawai. Jumlah pegawai laki-laki 54 orang atau 72% dan jumlah pegawai perempuan 21 orang atau 28%. Hal ini menunjukkan pegawai Disporabudpar didominasi oleh pegawai tenaga magang sebesar 54,67% dan didominasi pegawai laki-laki sebesar 72%.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per 31 Januari 2023)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Strata-2 / S.2	12	9	3
2	Strata-1 / S.1	36	25	11
3	Diploma 3	2	1	1
4	SLTA / Sederajat	24	22	2
5	SLTP / Sederajat	0	0	0
6	SD	1	1	0
	Jumlah	75	58	17

Sumber : Subag Umum Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2023

Berdasarkan komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan, sebesar 16,00% pegawai Disporabudpar merupakan lulusan Strata-2 (S2), 48,00% lulusan Strata-1 (S1), 2,67% lulusan Diploma 3 (D3), 32,00% lulusan SLTA, dan 1,33% lulusan SD. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 48,00% pegawai Disporabudpar merupakan lulusan Strata-1 (S1). Tentunya kondisi personel tersebut merupakan potensi SDM dalam menjalankan tupoksi sesuai bidang dan mendukung dalam pelayanan.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per 31 Januari 2023)

No	Golongan	Jumlah (org)	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Tk I (IV/b)	1	1	0
2	Pembina (IV/a)	5	4	1
3	Penata Tk I (III/d)	8	5	3
4	Penata (III/c)	0	0	0
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	2	2	0
6	Penata Muda (III/a)	3	1	2
	Jumlah	19	13	6
7	Pengatur Tk. I (II/d)	3	3	0
8	Pengatur (II/c)	3	3	0
9	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	1	0

No	Golongan	Jumlah (org)	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
10	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
	Jumlah	7	7	0
11	Juru Tingkat I (I/d)	0	0	0
12	Juru (I/c)	0	0	0
13	Juru Muda Tingkat I (I/b)	0	0	0
14	Juru Muda (I/a)	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
15	CPNS	0	0	0
16	Penata Muda (III/a)	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
16	Honor Daerah	8	5	3
17	Tenaga Kontrak / Magang	41	29	12
	Jumlah	49	34	15
	Jumlah Keseluruhan	75	54	21

Sumber : Subag Umum Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah Tenaga Kontrak / Magang yaitu 41 orang atau sebesar 54,67%.

2.2.2 Sumber Daya berupa Aset / Modal

Disamping sumber daya manusia, ketersediaan sarana penunjang lainnya berupa aset / modal untuk kegiatan operasional juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Adapun jenis aset / modal yang dimiliki oleh Disporabudpar Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Data Aset Tanah, Bangunan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Disporabudpar Kabupaten Sampang
(Per 31 Desember 2022)

No.	Jenis Aset	Satuan	Jumlah/Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Tanah	bidang	14		
2	Bangunan gedung kantor	unit	1		
3	Bangunan gedung olahraga	unit	2		
4	Bangunan gedung museum	unit	1		
5	Bangunan gedung kesenian	unit	1		
6	Bangunan gedung hotel	unit	1		
7	Bangunan bersejarah	unit	16	5	
8	Meubelair	unit	179	6	
9	Perlengkapan Kantor	unit	136	4	12
10	Kendaraan Dinas Operasional				

No.	Jenis Aset	Satuan	Jumlah/Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
	Roda 4	unit	5		
	Roda 3	unit			1
	Roda 2		17		3
11	Komputer PC / Laptop				
	Komputer PC	unit	4		3
	Laptop	unit	10		4
12	Perlengkapan Komputer	unit	18	2	1
13	Peralatan Kantor	unit	11		
14	Alat-alat Studio	unit	10		

Sumber : *Pengurus Barang Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2023*

Ketersediaan sumber daya aset / modal diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk dua tahun ke depan sumber daya aset / modal yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang.

2.2.3 Unit Usaha yang Masih Operasional

Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang berasal dari :

- 1) Pendapatan sewa sarana tempat olahraga.
- 2) Kontribusi pendapatan pengelolaan hotel dan pantai wisata camplong
- 3) Parkir di lingkungan tennis indoor, bulu tangkis indoor, dan tempat objek wisata.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan dalam rangka pemenuhan indikator kinerja Disporabudpar Kabupaten Sampang yang meliputi aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman				1,04	1,41	2,65	3,05	3,46	3,97	1,04	1,41	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0
2.	Rata-rata lama tinggal				0	0	0	55,46	72,10	77,64	0	0	0	26,28	0	0	0	0	0	43,38	0	0
3.	Persentase peningkatan produktivitas ekonomi kreatif				0	0	0	70,67	72,40	73,72	0	0	0	70,67	0	0	0	0	0	100,00	0	0
4.	Persentase peningkatan prestasi pemuda di tingkat nasional				11,00	-96,30	0	0	0	0	107,69	-94,44	0	0	0	0	979,00	101,97	0	0	0	0
5.	Persentase peningkatan prestasi kepemudaan dan keolahragaan di tingkat nasional				11,00	-96,30	33,33	10,34	66,67	70,00	107,69	-94,44	866,67	-72,41	0	0	979,00	101,97	2.666,28	-700,29	0	0
6.	Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan				61,11	0,00	50,00	66,67	70,00	72,73	76,19	57,14	50,00	150,00	0	0	124,67	100,00	100,00	224,99	0	0
7.	Persentase prestasi olahraga				52,00	40,00	0	0	0	0	291,30	75,00	0	0	0	0	560,19	187,50	0	0	0	0
8.	Persentase prestasi olahraga pada event keolahragaan				52,00	40,00	75,00	73,33	79,15	81,82	291,30	75,00	288,89	455,56	0	0	560,19	187,50	385,19	621,25	0	0
9.	Persentase organisasi kepemudaan aktif				83,87	87,10	0	0	0	0	83,87	83,87	0	0	0	0	100,00	96,29	0	0	0	0
10.	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif				26	27	18	22	21	22	26	26	18	22	0	0	100,00	96,29	100,00	100,00	0	0
11.	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional				11	0	2	2	7	8	16	4	2	3	0	0	145,45	100,00	100,00	150,00	0	0
12.	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional				80	2	6	55	35	45	201	6	52	41	0	0	251,25	300,00	866,67	74,55	0	0
13.	Persentase budaya daerah yang dilestarikan				40,48	45,25	50,00	54,76	59,52	64,29	40,48	45,25	50,00	54,76	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
14.	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan				17	19	21	23	25	27	17	19	21	23	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
15.	Persentase kelompok budaya daerah yang aktif				28,39	33,25	12,79	24,30	15,60	17,14	28,39	10,74	16,62	30,18	0	0	100,00	32,20	129,95	124,20	0	0
16.	Jumlah tradisi budaya yang dibina				N/A	3	2	5	7	9	0	3	2	5	0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	0	0
17.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan				12,50	0,00	62,50	75,00	87,50	100,00	12,50	0,00	62,50	75,00	0	0	100,00	0,00	100,00	100,00	0	0

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18.	Persentase benda cagar budaya yang dikelola museum				75,00	80,77	82,69	88,46	94,23	100,00	75,00	80,77	82,69	88,46	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
19.	Persentase pertumbuhan kunjungan wisata				11,42	-82,88	76,58	73,36	78,99	79,01	167,76	-93,28	103,71	95,67	0	0	1.469,00	88,85	135,43	130,41	0	0
20.	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif				20,00	83,30	27,27	12,50	33,33	34,72	20,00	83,30	506,06	93,00	0	0	100,00	100,00	1.855,74	744,00	0	0
21.	Jumlah kunjungan wisata				350.477	60.000	100.000	200.000	319.588	572.102	842.241	56.633	115.369	225.737	0	0	240,31	94,39	115,37	112,87	0	0
22.	Jumlah pelaku ekonomi kreatif				N/A	33	42	225	72	97	0	33	200	386	0	0	0,00	100,00	476,19	171,56	0	0
23.	Persentase pokdarwis aktif				37,50	50,00	75,00	57,14	91,67	100,00	37,50	75,00	100,00	54,29	0	0	100,00	150,00	133,33	95,01	0	0
24.	Jumlah obyek destinasi tujuan wisata (ODTW) baru				9	8	0	0	0	0	9	8	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0
25.	Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata				21,43	4,17	5,88	97,22	37,50	38,18	242,86	-29,17	5,88	220,00	0	0	1.133,27	-14,30	100,00	226,29	0	0
26.	Jumlah obyek destinasi wisata				9	8	10	12	14	16	9	8	10	12	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0
27.	Jumlah promosi dan informasi pariwisata				N/A	14	62	125	130	137	0	14	72	124	0	0	0,00	100,00	116,13	100,00	0	0
28.	Jumlah pelatihan keterampilan SDM pariwisata				N/A	2	1	1	2	3	0	2	1	1	0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	0	0

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2023

Realisasi pencapaian target selama 4 (empat) tahun periode RPJMD Pembangunan Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk mengukur capaian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang didasarkan pada Tujuan dan sasaran serta target yang ditetapkan pada periode sebelumnya yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program prioritas untuk mendukung capaian RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Dari tabel data pencapaian kinerja pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian pada tahun 2019 sampai tahun 2021 sebagai berikut :

1. Persentasi peningkatan prestasi kepemudaan dan keolahragan di tingkat nasional pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2018 prestasi di tingkat nasional yang diperoleh sebanyak 26 prestasi, sedangkan pada tahun 2019 prestasi nasional yang diperoleh sebanyak 54 prestasi. Peningkatan ini dikarenakan pada tahun 2019 pengiriman peserta pada satu event banyak mengikutkan peserta dan kategori lomba dalam satu event yang diikuti banyak. Pada tahun 2020 jumlah prestasi nasional mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pandemi covid 19 dimana banyak event-event / perlombaan yang ditunda dan tidak ada kepastian pelaksanaan event sampai akhir tahun baik dari provinsi maupun pusat, pada tahun 2020 prestasi nasional yang diperoleh sebanyak 3 prestasi. Tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya kelonggaran kebijakan pemerintah pada masa pandemi covid 19 untuk pelaksanaan event kepemudaan maupun olahraga, dimana sebelumnya banyak event-event / perlombaan yang ditunda dan tidak ada kepastian pelaksanaan event baik dari provinsi maupun pusat, pada tahun 2021 prestasi Nasional yang diperoleh sebanyak 29 prestasi. Tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan : (1) Pelaksanaan event Nasional masih minim karena masih masa pemulihan pandemi Covid 19, (2) Belum optimalnya keterlibatan berbagai pihak terutama pihak swasta dalam pelaksanaan event kepemudaan maupun keolahragaan, (3) Strategi, peran dan prioritas dari pemerintah menjadi organisasi induk untuk mengelola kepemudaan dan keolahragaan bagaimanapun juga porsi perhatian bagi pemuda dan olahraga masih kurang bila dibanding dengan bidang lain.

Program pembinaan, pengembangan dan pengelolaan masih perlu disempurnakan, semua upaya baik dari pemuda maupun atlet pada akhirnya bermuara pada inisiasi pemerintah.

2. Pada tahun 2019 persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan mengalami peningkatan dari target, hal ini dikarenakan prestasi yang diperoleh mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang diperoleh sebanyak 8 prestasi sedangkan di tahun 2019 prestasi yang diperoleh sebanyak 16 prestasi. Sedangkan pada event yang diikuti mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 18 event yang diikuti, sedangkan tahun 2019 event yang diikuti 21 event. Pada tahun 2020 yang diprediksi tidak ada event kepemudaan karena pandemi covid 19 yang semula target prestasi tidak ada, pada triwulan IV (empat) mendapatkan 4 prestasi di Tingkat Regional maupun Nasional. Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan pada tahun 2020 mengalami penurunan, prestasi yang diperoleh sebanyak 4 prestasi dari 7 event yang diikuti. Pada tahun 2021 terealisasi sesuai target yang diharapkan yaitu sebesar 50,00% atau mencapai 100%. Namun dibandingkan tahun sebelumnya perolehan prestasi pemuda mengalami penurunan, pada tahun 2021 prestasi yang diperoleh sebanyak 2 prestasi dari 4 event yang diikuti. Tahun 2022 persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan terealisasi sebesar 150,00% atau mencapai 224,99%. Dibandingkan tahun sebelumnya perolehan prestasi pemuda mengalami kenaikan dan event yang diikuti mengalami penurunan, pada tahun 2022 prestasi yang diperoleh sebanyak 3 prestasi dari 2 event yang diikuti. Perolehan prestasi berasal dari perwakilan Karang Taruna Rongtengah.
3. Pada tahun 2019 persentase prestasi olahraga pada event keolahragaan mengalami peningkatan dari target, hal ini dikarenakan prestasi yang diperoleh mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang diperoleh sebanyak 78 prestasi sedangkan di tahun 2019 prestasi yang diperoleh sebanyak 201 prestasi. Sedangkan pada event yang diikuti mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 150 event yang diikuti, sedangkan tahun 2019 event yang diikuti 69 event. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, penurunan prestasi olahraga karena pandemi covid 19 dan tidak ada kepastian pelaksanaan event olahraga baik dari provinsi maupun dari pusat. Pada tahun 2020 prestasi yang diperoleh sebanyak 6 prestasi dari 8 event yang diikuti. Tahun 2022 mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya. Namun dibandingkan pada tahun 2021 perolehan prestasi dan event yang

diikuti mengalami penurunan. Penurunan perolehan prestasi disebabkan karena :

1. Cabor tidak mengikuti event kejuaraan karena minimnya atlet;
2. Perolehan prestasi di event PORPROV tidak memenuhi target prestasi yang diharapkan;
3. Perolehan prestasi di event POPDA tidak ada prestasi yang diperoleh;
4. Pelaksanaan event Regional / Nasional masih minim karena masih masa pemulihan pandemi Covid 19.

Pada tahun 2022 prestasi yang diperoleh sebanyak 41 prestasi dari 9 event olahraga yang diikuti.

4. Persentase organisasi kepemudaan aktif pada tahun 2019 mencapai target 100% yaitu 26 OKP yang aktif. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari target yaitu 27 OKP terealisasi sebanyak 26 OKP yang aktif, tidak mencapai target karena adanya refocusing anggaran untuk pembinaan OKP. Pada tahun 2021 persentase organisasi kepemudaan yang aktif mencapai target 100% yaitu 18 OKP. Di Tahun 2022 persentase organisasi kepemudaan yang aktif mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dari 18 OKP menjadi 22 OKP yang aktif.
5. Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari target. Target 11 pemuda yang berprestasi terealisasi 16 pemuda yang berprestasi atau sebesar 145,45%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan pemuda berprestasi dari tahun sebelumnya yaitu dari target 0 pemuda berprestasi terealisasi 4 pemuda yang berprestasi. Hal ini pada tahun 2020 yang diprediksi tidak ada event kepemudaan karena pandemi covid 19 yang semula target pemuda berprestasi tidak ada, pada triwulan IV (empat) mendapatkan 4 pemuda berprestasi di Tingkat Regional maupun Nasional. Pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali dalam perolehan prestasi dari tahun sebelumnya walaupun target yang ditetapkan memenuhi target. Pada tahun 2021 pemuda berprestasi terealisasi 2 pemuda berprestasi. Di tahun 2022 pemuda yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional mengalami peningkatan dari target, semula prestasi pemuda di targetkan 2 prestasi terealisasi 3 prestasi atau sebesar 150,00%.
6. Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari target. Target 80 prestasi terealisasi 201 prestasi atau sebesar 251,25%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan prestasi dari tahun sebelumnya yaitu terealisasi 6 prestasi, hal ini karena

adanya pandemi covid 19 yang mengakibatkan ketidakpastian pelaksanaan event keolahragaan. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya prestasi yang diperoleh sebanyak 52 prestasi dari target 6 prestasi atau sebesar 866,67%. Di tahun 2022 mengalami penurunan prestasi dari tahun sebelumnya yaitu terealisasi 41 prestasi dari target 55 prestasi, hal ini dikarenakan (1) Cabor tidak mengikuti event kejuaraan karena minimnya atlet, (2) Perolehan prestasi di event PORPROV tidak memenuhi target prestasi yang diharapkan, (3) Perolehan prestasi di event POPDA tidak ada prestasi yang diperoleh, dan (4) Pelaksanaan event Regional / Nasional masih minim karena masih masa pemulihan pandemi Covid 19.

7. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 persentase budaya daerah yang dilestarikan sesuai dengan target 100%, hal ini sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahun 2019 budaya daerah yang dilestarikan terealisasi sebanyak 17 budaya daerah dari target 42 budaya daerah yang dilestarikan, pada tahun 2020 terealisasi sebanyak 19 budaya daerah dari target 42 budaya daerah yang dilestarikan, pada tahun 2021 terealisasi sebanyak 21 budaya daerah dari target 42 budaya daerah yang dilestarikan, sedangkan pada tahun 2022 terealisasi sebanyak 23 budaya daerah dari target 42 budaya daerah yang dilestarikan.
8. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 budaya daerah yang dilestarikan sesuai dengan target 100%, Pada tahun 2019 budaya daerah yang dilestarikan terealisasi sebanyak 17 budaya daerah yang dilestarikan dari target 17 budaya daerah yang dilestarikan, pada tahun 2020 terealisasi sebanyak 19 budaya daerah yang dilestarikan dari target 19 budaya daerah yang dilestarikan, pada tahun 2021 terealisasi sebanyak 21 budaya daerah yang dilestarikan dari target 21 budaya daerah yang dilestarikan, sedangkan pada tahun 2022 terealisasi sebanyak 23 budaya daerah yang dilestarikan dari target 23 budaya daerah yang dilestarikan.
9. Persentase kelompok budaya daerah yang aktif pada tahun 2019 terealisasi 28,39% sesuai target yang diharapkan 28,39% atau sebesar 100%. Pada tahun 2020 tidak tercapai target karena banyaknya kelompok budaya / seni yang tidak memperpanjang ijin pentas kesenian karena pandemi covid 19, dan terbatasnya ruang gerak kelompok budaya / seni untuk mengekspresikan seni / budaya karena tidak mendapatkan ijin dari Satgas covid 19. Dari target 33,25 terealisasi 10,74% atau sebesar 32,30%. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 16,62% dari target 12,79%. Hal ini disebabkan mulai adanya

kesadaran pelaku seni budaya yang memperpanjang Nomor Induk Kesenian (NIK), walupun terbatasnya ruang gerak kelompok seni budaya untuk mengekspresikan seni budaya dimasa pandemi covid 19.

Di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 30,18% dari target 24,30%. Seiring dengan semakin melandainya pandemi covid-19, pelaku seni budaya di Kabupaten Sampang mulai menunjukkan gairah untuk melaksanakan kegiatan berseninya, dengan mulai tampil dalam mengisi berbagai event kebudayaan dan kepariwisataan. Pertunjukan seni budaya merupakan daya tarik tersendiri bagi pengunjung atau wisatawan untuk hadir dan menyaksikan pertunjukannya yang mencirikan kekhasan sebagai kearifan lokal. Pemerintah Daerah melalui Disporabudpar mendukung para pelaku seni budaya lebih sering mengadakan pentas seni budaya serta mempermudah perizinan bagi masyarakat atau pelaku seni budaya yang ingin mengadakan acara atau event. Hal ini berdampak semakin banyaknya kesadaran pelaku seni budaya yang memperpanjang Nomor Induk Kesenian (NIK). Pada tahun 2021 kelompok budaya daerah yang aktif sebanyak 65 kelompok budaya, sedangkan pada tahun 2022 kelompok budaya daerah yang aktif sebanyak 118 kelompok budaya daerah yang aktif.

10. Persentase pertumbuhan kunjungan wisata pada Tahun 2019 meningkat sebesar 1.469%, disebabkan penambahan venue dan destinasi baru pantai Lon Malang, jumlah kunjungan pada Tahun 2019 sebanyak 842.241 orang yang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 841.745 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 496 orang. Dibandingkan pada tahun 2018 jumlah kunjungan naik dari 314.552 orang menjadi 842.241. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -93.28% dari target -82.88%, hal ini disebabkan pandemi covid 19 dimana seluruh destinasi ditutup mulai bulan Maret 2020 sampai bulan Agustus 2020, jumlah kunjungan pada tahun 2020 sebanyak 56.633 orang yang terdiri dari wisatawan nusantara sebanyak 56.630 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 3 orang. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 103,71% dari target 76,58%, hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk pemulihan masa pandemi covid 19 dimana seluruh destinasi boleh dibuka dengan batasan pengunjung yang ditetapkan dan protokol kesehatan yang ketat dan penerapan standar CHSE (*Clean Healty Safety And Environment*), meskipun sempat terjadi penutupan sementara untuk destinasi wisata akibat kebijakan PPKM pusat di bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2021 jumlah kunjungan tetap stabil bahkan meningkat sebanyak

103,71 % dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2020) dimana pada tahun sebelumnya yaitu di tahun 2020 jumlah kunjungan terdata sebanyak 56.633 kunjungan yang di dominasi oleh wisatawan domestik, dan di tahun 2021 terjadi peningkatan data kegiatan kunjungan menjadi 115.369 wisatawan domestik dan 5 wisatawan mancanegara. Hal ini mengindikasikan bahwasannya tingkat kebutuhan masyarakat akan rekreasi masih relatif masih sangat tinggi, pada khususnya untuk kalangan masyarakat nusantara yang mengalami masa trauma mental dan psikis akibat pandemi covid 19 pada 2 (dua) tahun terakhir.

Pada tahun 2022 pertumbuhan kunjungan wisata mengalami kenaikan sebesar 95,67% dari target 73,36%, hal ini disebabkan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan lokal di bulan-bulan kunjungan (*high season*) pada bulan Mei, Agustus, Juli, Desember berprogres naik sebesar rata rata 15% - 20% per bulan, daripada bulan-bulan biasanya, pada sejumlah destinasi wisata pantai seperti Lon Malang dan Air Terjun Toroan. Penambahan jumlah kunjungan wisatawan pada akhir tahun juga disebabkan oleh adanya pembukaan 2 (dua) destinasi wisata baru yaitu Wisata Mangrove Sreseh (WMS) Spot Mangrove Marparan dan Spot Mangrove Klobur yang baru di buka pada bulan Desember tahun 2022.

11. Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada tahun 2019 dan tahun 2020 terealisasi sesuai target yang diharapkan. Pada tahun 2019 persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif terealisasi 20,00%, pada tahun 2020 mengalami peningkatan persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif terealisasi 80,30%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 506,06% dari target 27,27%, hal ini disebabkan adanya perbedaan data perhitungan ekonomi kreatif, dimana sebelumnya perhitungan didasarkan pada pelaku ekonomi kreatif yang ada di masing-masing lintas sektor (OPD), pada tahun 2021 perhitungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang meliputi bidang arsitektur; desain; film, video dan fotografi; kerajinan; kuliner; fashion; musik; periklanan; permainan interaktif; penerbitan; penelitian dan pengembangan; seni pertunjukan; seni rupa; teknologi informasi; serta televisi dan radio (penyiaran).

Pada tahun 2022 pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif mengalami kenaikan sebesar 93,00% dari target 12,50%. Berdasarkan data tahun 2022 terdapat sekitar 386 jumlah pelaku usaha kreatif di Kabupaten Sampang yang didominasi oleh usaha penerbitan, seni pertunjukan, kriya dan fesyen. Selain itu, terdapat 3 sub sektor ekonomi kreatif mulai mengalami pertumbuhan yaitu

musik, fotografi dan sub sektor film, animasi, dan video. Pertumbuhan yang pesat di sektor ini didukung oleh semakin tingginya adopsi teknologi digital di masyarakat. Tahun 2022 adalah momentum pertumbuhan ekonomi kreatif (ekraf) bagi Kabupaten Sampang, dengan semakin tumbuhnya wirausaha baru dari generasi milenial yang semakin menunjukkan eksistensinya menjadi ujung tombak pengembangan ekonomi kreatif pada berbagai subsektor.

12. Persentase pokdarwis aktif pada tahun 2019 terealisasi 37,50% sesuai target yang diharapkan 37,50% atau sebesar 100%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 150%, dari target 50,00% terealisasi 75,00%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 133,33% dari target 75,00% terealisasi 100,00%.

Pada tahun 2022 pokdarwis aktif mengalami penurunan dari target 20 pokdarwis aktif atau sebesar 57,14% terealisasi 19 pokdarwis aktif atau sebesar 54,29%. Tidak tercapainya target dikarenakan tidak semua desa memiliki Pokdarwis karena SDM yang minim pemahaman tentang pariwisata sehingga kurang maksimal dalam mengelola potensi desa yang ada. Kendala lain yang terjadi, karena masih minimnya kesadaran partisipatif masyarakat. Artinya, terdapat sebagian kelompok masyarakat yang masih enggan untuk mengambil peran dan terlibat dalam mendukung geliat wisata desa. Tidak banyak warga yang ikut berpartisipasi mengelola potensi-potensi di desa. Lemahnya dukungan program pemerintah desa setempat menjadi faktor kendala lainnya. Program pemerintah desa setempat untuk menggerakkan partisipasi warga dalam aktivitas wisata desa dan pembinaan pokdarwis tingkat desa sejauh ini masih sangat minim.

13. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 jumlah obyek destinasi wisata sesuai dengan target 100%, Pada tahun 2019 jumlah obyek destinasi wisata terealisasi sebanyak 9 destinasi dari target 9 destinasi, pada tahun 2020 jumlah obyek destinasi wisata terealisasi sebanyak 8 destinasi dari target 8 destinasi, pada tahun 2021 jumlah obyek destinasi wisata terealisasi sebanyak 10 destinasi dari target 10 destinasi, sedangkan pada tahun 2022 jumlah obyek destinasi wisata terealisasi sebanyak 12 destinasi dari target 12 destinasi. Adapun obyek yang dimaksud adalah Tamberu daya :

1. Sokobanah Daya
2. Bira Timur Kampung Melon
3. Kampung Balana - Bleran
4. Desa Wisata Bira Tengah
5. Air Terjun Toroan

6. Desa Marparan
 7. Desa Robor
 8. Desa Wisata Talambeh
 9. Desa Wisata Napo Laok
 10. Kampung Belanda Krampon
 11. Desa Astapah
 12. Kampung Kefandes - Ketapang
14. Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1.133,27% dari target 21,43% terealisasi 242,86%. Pada tahun 2020 persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata tidak mencapai target karena banyak pelaku usaha yang sudah beroperasi maupun yang baru beroperasi ada yang tutup dan banyak yang merumahkan sebagian karyawannya karena pandemi covid 19. Pada tahun 2020 target 4,17% terealisasi -29,17% atau sebesar -14,30%, pada tahun 2021 tercapai sesuai target 5,88% atau sebesar 100,00%. sedangkan pada tahun 2022 pertumbuhan pelaku usaha wisata mengalami peningkatan sebesar 226,29% dari target 97,22% atau sebanyak 71 pelaku usaha wisata terealisasi 220,00% atau sebanyak 128 pelaku usaha wisata.

Perubahan Resntra Tahun 2019-2024 pada tahun 4 (empat) yaitu tahun 2022 adanya penyelarasan penajaman RPJMD Tahun 20019 – 2024 dan perubahan SOTK Tahun 2023 yang tentunya berimbas pada penentuan kembali target dan indikator tujuan, sasaran maupun program yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Berimbas pula pada penyesuai perubahan indikator Pencapaian Kinerja Pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang pada Tahun 2022-2024.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN ASLI DAERAH	217.250.000	147.750.000	347.750.000	262.000.000	330.000.000	390.000.000	239.455.000	145.010.000	199.155.000	202.810.000	0	0	110,22	98,15	57,27	77,41	0	0	24,57	(0,42)
JUMLAH BELANJA	26.974.805.139	27.865.915.965	17.359.174.981	17.156.689.088	11.162.368.988	11.653.075.797	25.453.773.616	26.834.305.064	16.684.784.027	16.652.067.281	0	0	94,36	96,30	96,12	97,06	0	0	(13,22)	(6,48)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.705.079.189	2.676.127.909	0	0	0	0	2.332.106.530	2.158.891.333	0	0	0	0	86,21	80,67	0	0	0	0	(20,21)	(6,58)
Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	605.532.200	852.381.117,5	0	0	0	0	572.009.211	686.856.651	0	0	0	0	94,46	80,58	0	0	0	0	(11,85)	(15,98)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	148.547.000	103.891.301,5	0	0	0	0	127.776.900	81.114.986	0	0	0	0	86,02	78,08	0	0	0	0	(26,01)	(27,30)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	44.620.000	37.495.680	0	0	0	0	43.106.000	29.977.500	0	0	0	0	96,61	79,95	0	0	0	0	(23,19)	(26,09)
Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	1.355.068.000	119.826.255	0	0	0	0	1.338.165.700	111.626.300	0	0	0	0	98,75	93,16	0	0	0	0	(38,23)	(38,33)
Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	16.870.919.000	20.329.802.750	0	0	0	0	16.223.371.682	20.232.438.490	0	0	0	0	96,16	99,52	0	0	0	0	(15,90)	(15,06)
Program Pengelolaan Budaya Daerah	2.144.294.750	688.412.172	0	0	0	0	1.772.586.866	568.032.162	0	0	0	0	82,67	82,51	0	0	0	0	(33,58)	(33,59)
Program Pengembangan Pariwisata Daerah	3.100.745.000	3.057.978.780	0	0	0	0	3.044.650.727	2.965.367.642	0	0	0	0	98,19	96,97	0	0	0	0	(20,28)	(20,52)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	0	0	4.266.129.113	3.991.622.159	4.291.407.449	4.480.061.207	0	0	3.847.222.462	3.767.726.700	0	0	0	0	90,18	94,39	0	0	1,09	(0,41)
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	0	0	678.907.886	503.692.639	746.750.389	779.578.142	0	0	595.402.044	494.165.488	0	0	0	0	87,70	98,11	0	0	5,37	(3,40)
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	0	0	9.630.970.443	10.403.949.715	2.292.099.070	2.392.861.607	0	0	9.480.023.393	10.328.879.690	0	0	0	0	98,43	99,28	0	0	(13,11)	1,79
Program Pengembangan Kebudayaan	0	0	532.614.510	317.987.425	779.887.042	814.171.510	0	0	530.145.415	313.603.450	0	0	0	0	99,54	98,62	0	0	21,87	(8,17)
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	0	0	67.108.088	106.185.620	347.964.127	363.260.913	0	0	67.108.088	106.085.620	0	0	0	0	100,00	99,91	0	0	58,06	(11,62)
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	0	0	502.703.376	766.469.204	439.223.069	458.531.672	0	0	497.587.400	616.280.600	0	0	0	0	98,98	80,41	0	0	2,83	4,77
Program Pengelolaan Permuseuman	0	0	60.750.445	17.333.426	67.377.524	70.339.494	0	0	59.939.300	17.302.000	0	0	0	0	98,66	99,82	0	0	44,33	(14,23)
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	0	0	688.102.862	663.723.149	1.147.830.415	1.198.289.973	0	0	684.790.425	645.865.794	0	0	0	0	99,52	97,31	0	0	14,76	(1,14)
Program Pemasaran Pariwisata	0	0	520.324.513	163.245.816	570.028.908	595.087.842	0	0	519.190.000	163.199.750	0	0	0	0	99,78	99,97	0	0	36,99	(13,71)
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	0	411.563.745	222.479.935	479.800.995	500.893.437	0	0	403.375.500	198.958.189	0	0	0	0	98,01	89,43	0	0	14,82	(10,14)

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2023

Pada tabel 2.6 data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan target Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2019-2024 sebesar 24,57 persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata -0,42 persen. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penyewa sarana dan prasarana olahraga dari tahun ke tahun mengalami penurunan karena (1) adanya pandemi covid 19, (2) adanya persaingan dengan pihak swasta yang sarana prasarananya lebih baik dari sarana prasarana yang dimiliki disporabudpar, dari Hasil dari Bangun Guna Serah mengalami peningkatan karena tarif retribusi sesuai dengan MoU mengalami kenaikan, sedangkan di Pelayanan Tempat Khusus Parkir mengalami peningkatan karena ada penambahan obyek parkir baru. Jumlah belanja (total belanja) merupakan jumlah total dari anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Disporabudpar Kabupaten Sampang yang dialokasikan dari Tahun 2019-2024. Rata-rata pertumbuhan target jumlah belanja sebesar -13,22 persen dan realisasinya sebesar -6,48 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terletak pada Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan pertumbuhan target sebesar 58,06 persen dan realisasinya sebesar -11,62 persen. Hal ini dikarenakan pada program tersebut terdapat kegiatan pelestarian budaya daerah dan kesenian tradisional yang perlu penanganan serius tentang kesadaran masyarakat terhadap pelestarian dan keragaman budaya daerah, pelaku seni serta aktualisasi dan apresiasi tradisi, dan kesadaran tentang harmonisasi dan toleransi keragaman budaya. Sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah pada jumlah belanja terdapat pada Program Pembinaan dan Pengembangan kepemudaan sebesar -38,23 persen dan realisasi sebesar -38,33 persen. Hal ini dikarenakan beberapa kegiatan yang ada di program pembinaan dan pengembangan kepemudaan tidak selalu dianggarkan setiap tahunnya melainkan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan kegiatan kepemudaan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinamika pembangunan yang terus berkembang terutama sejak Penerapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberi peluang yang lebih besar kepada daerah dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan karakteristik yang spesifik dan potensi-potensi sumber daya yang tersedia. Adanya hubungan dalam bidang keuangan, pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi, informasi dan sumber daya lainnya menyebabkan diperlukannya koordinasi dalam

menentukan kebijakan program dan perencanaan pembangunan antara pemerintahan, dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Selanjutnya berikut merupakan tabel analisa korelasi antara Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang dengan Renstra Provinsi serta Lembaga Kementrian yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang. Dimana dengan tabel berikut akan dapat dijelaskan :

- a. Capaian sasaran pelaksanaan Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra OPD Provinsi dan Renstra K/L.
- b. Tingkat capaian kinerja Disporabudpar Kabupaten Sampang melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra OPD Provinsi atau Renstra K/L.

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan selaras dengan tugas dan fungsi.

Tabel 2.7
Sasaran Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang terhadap
Sasaran Renstra Provinsi dan Renstra K / L Terkait

No.	Sasaran Resntra Disporabudpar Kabupaten Sampang	Sasaran pada Renstra Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra K / L
1	2	3	4
1	Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan	1. Meningkatkan peran aktif pemuda dalam Pembangunan	1. Meningkatkan peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan
2.	Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	2. Meningkatkan olahragawan berprestasi dan budaya olahraga di masyarakat	2. Meningkatkan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas Pemuda
		2. Meningkatkan apresiasi dan kreativitas terhadap seni budaya	3. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional
		3. Meningkatkan pemeliharaan / pelestarian cagar budaya	4. Meningkatkan inventarisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai tradisi
		4. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	5. Meningkatkan internalisasi nilai-nilai sejarah
		5. Meningkatkan devisa dan pengeluaran wisatawan nusantara	6. Meningkatkan
		6. Meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PDRB	

No.	Sasaran Resntra Disporabudpar Kabupaten Sampang	Sasaran pada Renstra Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra K / L
1	2	3	4
		7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata	investasi di sektor Pariwisata 7. Meningkatkan devisa dan pengeluaran wisatawan 8. Meningkatkan kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja Nasional

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2023

2.4.1. Hasil telaahan terhadap RTRW

Menindaklanjuti amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 9, yang menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan :

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial

dimana pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RTRW sendiri merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah bertujuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan telaah RTRW Kabupaten Sampang dikaitkan dengan rencana struktur ruang dengan program kerja Disporabudpar Kabupaten Sampang serta pengaruh dari perencanaan struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah maka diperoleh penjelasan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten Sampang

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pusat Olahraga dan Kesenian, budaya ratu ibu, petilasan Trunojoyo, Goa Lebar, wisata taman laut Mandangin. Kec. Sampang	Sudah ada tetapi butuh pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pembinaan dan pengembangan olahraga 2. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan 3. Program pengelolaan budaya daerah 4. Program pengembangan kebudayaan 5. Program pengembangan kesenian tradisional 6. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya 7. Program pengembangan pariwisata daerah 8. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Kec. Sampang
2	Pengembangan dan revitalisasi stadion Olahraga Krampon-Torjun	Belum ada	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Krampon-Torjun
3	Gedung Olahraga dan Lapangan Sepak Bola kecamatan Sreseh	Belum ada	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Kecamatan Sreseh
4	Gedung Olahraga dan Lapangan Sepak Bola Kecamatan Pengarengan	Belum ada	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Kecamatan Pengarengan
5	Gedung Olahraga dan Lapangan Sepak Bola dan Wisata Camplong, agrowisata jambu air	Belum ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan 2. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Kecamatan Camplong

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Gedung Olahraga dan Lapangan Sepak Bola Kecamatan Jrengik	Belum ada	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Kecamat Jrengik
7	Gedung Olah Raga dan Lapangan Sepak Bola dan Fasilitas Skala kecamatan seperti lapang Volly dan sepak bola, wisata budaya	Belum ada	1. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan 2. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Kecamatan sokobanah
8	Fasilitas olahraga Skala Kecamatan di Kec. Kedundung	Belum ada	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Kec. Kedundung
9	Fasilitas olahraga Skala Kecamatan di Kec. Karang Penang	Belum ada	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Kec. Karang Penang
10	Fasilitas olahraga Skala Kecamatan di Kec. Omben	Belum ada	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Kec. Omben
11	Fasilitas olahraga Skala Lokal di Kec. Tambelangan	Belum ada	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Penambahan PDRB Kab. Sampang	Kec. Tambelangan
12	Fasilitas olahraga Skala Lokal di Kec. Omben	Belum ada	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Penambahan PDRB Kab. Sampang	di Kec. Omben

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2021

2.4.2. Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Maraknya isu degradasi lingkungan hidup, maka pada proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.” Dengan demikian penyusunan KLHS menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan lingkungan.

Salah satu alat pengendalian yang digunakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Disporabudpar Kabupaten Sampang mendukung dalam pencapaian tujuan :

- a. Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- b. Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Berikut merupakan hasil analisis dokumen KLHS yang memuat kajian yang berhubungan dengan tugas dan fungsi layanan Disporabudpar Kabupaten Sampang, antara lain akan dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Analisis Capaian Indikator TPB sesuai Tugas dan Fungsi Pelayanan Disporabudpar

Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG's)	Capaian Existing		Target RPJMN2020	Gap Capaian 2019 dengan Target RPJMN 2020	Keterangan	Perangkat Daerah
		2019	2020				
Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi							
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	15,34	27,37	Meningkat menjadi 8%	-	Tidak tersedia data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	496	3	Meningkat menjadi 20 juta (skala Nasional)	0	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target Nasional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	841.745	56.630	Meningkat	-	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target Nasional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	n/a	n/a	Meningkat	-	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target Nasional	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan							
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	n/a	n/a	Ada	-	Tidak tersedia data	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2019-2024

Berdasarkan capaian indikator pada tujuan 8 : pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan tujuan 11 : kota dan pemukiman yang berkelanjutan, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan, isu strategis dan rekomendasi sebagai berikut :

Tabel 2.10
Permasalahan dan Isu Strategis Indikator TPB sesuai Tugas dan Fungsi Pelayanan Disporabudpar

Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG's)	Permasalahan	Isu Strategis	Rekomendasi
Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi				
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menurun akibat adanya pandemi Covid-19	Penurunan Tingkat setengah pengangguran	
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menurun akibat adanya pandemi Covid-19	Peningkatan Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara hingga 3,98% • Meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara hingga 59.630 wisatawan pada tahun 2024
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menurun akibat adanya pandemi Covid-19	Peningkatan jumlah wisatawan nusantara	Jangka Panjang
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	Karena adanya penutupan destinasi wisata selama pandemi Covid-19 menyebabkan pengurangan jumlah wisatawan dan penurunan devisa sektor pariwisata	Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan potensi sumber daya alam dan budaya
				Jangka Menengah
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Destinasi Pariwisata
				Jangka Pendek
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 2. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 3. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan				
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Tidak tersedia data	Pengembangan kota pusaka	

Sumber : Revisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2019-2024

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang. Sumber daya Disporabudpar Kabupaten Sampang yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuannya. Disamping potensi tersebut, Disporabudpar Kabupaten Sampang juga dihadapkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu jumlah SDM yang terbatas, dimana SDM tersebut belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga belum optimal. Selain permasalahan sumber daya manusia, Disporabudpar Kabupaten Sampang dihadapkan pada beberapa permasalahan lainnya antara lain masalah kelembagaan (kurangnya pemahaman terhadap tupoksi), belum optimalnya sistem pengelolaan database, belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan. Selain faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang. Faktor-faktor dimaksud antara lain :

1) Pandemi Covid 19

Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan di seluruh sektor kehidupan. Berbagai perubahan ini turut menuntut penyesuaian-penyesuaian yang tidak hanya pada aspek kesehatan, sosial maupun ekonomi namun juga perencanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

2) Globalisasi

Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia, seperti arus pandangan (*value*) demokrasi, perdagangan bebas (WTO, CAFTA) dan perkembangan teknologi (IT)

3) Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Manajemen Pembangunan tidak terlepas dari landasan /acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres / Kepres, Permen / Kepmen terkait, Perda dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan berubahnya landasan /acuan hukum yang mendasari, disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

4) Jumlah Penduduk yang terus bertambah

Salah satu dampak meningkatnya jumlah penduduk adalah semakin merosotnya mutu lingkungan dan sumber daya alam.

5) Disamping empat permasalahan diatas, juga terdapat masalah lain yaitu terbatasnya sumber daya manusia di lingkungan Disporabudpar Kabupaten Sampang yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel dalam bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan Ekraf. Selain itu, kualitas SDM yang kurang mumpuni di lingkungan Disporabudpar Kabupaten Sampang dapat mengakibatkan dalam proses pelaksanaan rencana menimbulkan perilaku melanggar (*shortcutting*). Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia memang sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, sumberdaya manusia yang berkualitas masih belum dapat terpenuhi secara memadai. Dari uraian diatas dapat di simpulkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Hasil capaian kinerja kurang maksimal karena jumlah dan minimnya kemampuan SDM	Jumlah SDM yang sesuai dengan keahlian masih terbatas	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Disporabudpar dalam melaksanakan tugas dan fungsi berpengaruh terhadap capaian kinerja tidak maksimal Faktor Eksternal: Kuranginya dukungan Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan SDM yang sesuai dengan keahlian
2.	Peraturan perundangan kurang bisa diterapkan secara maksimal	Tupoksi belum dapat dijalankan secara maksimal	Faktor Internal: Kuranginya kesadaran pejabat terakit dalam mengevaluasi kinerjanya sehingga tidak tercapai target kinerja sebagaimana telah ditentukan sebelumnya. Faktor Eksternal: Terdapat kendala teknis pada penentuan indikator sasaran RPJMD karena tidak mampu mencapai target
3.	Masih rendahnya animo dan peran serta kelompok seni budaya yang aktif untuk memperpanjang NIK	Rendahnya kelompok kesenian untuk melakukan perpanjangan Nomor Induk Kesenian (NIK)	Faktor Internal: SDM yang menangani NIK tidak memadai dengan banyaknya kelompok seni budaya Faktor Eksternal: Secara global jumlah kelompok kesenian cenderung meningkat namun kesadaran kelompok seni melakukan perpanjangan Nomor Induk Kesenian rendah
4.	Pengumpulan database bidang masih belum memenuhi target	Pengumpulan database bidang belum menjadi prioritas bidang	Faktor Internal: Pendanaan mengenai database belum dianggarkan Faktor Eksternal: Terdapat kendala teknis dalam pengumpulan database dilapangan
5.	Fasilitas olahraga masih belum memenuhi standart dan belum merata penyebarannya	Banyaknya keberadaan sarana dan prasarana olahraga yang kurang representatif	Faktor Internal: Kuranginya kegiatan pengkajian dan evaluasi sarana dan prasarana olahraga Faktor Eksternal: Pendanaan mengenai sarana dan prasarana olahraga terbatas
6.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sampang	Budaya masyarakat dalam mendukung pariwisata belum sepenuhnya baik	Faktor Internal: Kuranginya SDM pariwisata untuk melakukan pengembangan pariwisata Faktor Eksternal: Rendahnya keterbukaan masyarakat untuk menerima dan memberikan masukan terkait dengan pengembangan kepariwisataan

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2023

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut :

Visi:
“Sampang Hebat Bermartabat”



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 2 yaitu **"Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif"**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang yaitu Peningkatan kompetensi, kreatifitas pemuda dan promosi kesenian daerah menjadi kota tujuan wisata.

Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : "Sampang Hebat Bermartabat"				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Misi 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>Program Aksi: Peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya koordinasi lintas sektor yang efektif dan implementatif untuk mengelola sektor pariwisata 2. Masih rendahnya kegiatan promosi di Bidang Pariwisata baik di dalam daerah maupun di luar daerah 3. Belum tertatanya pelaku usaha pariwisata dan penumbuhan kesadaran tentang pariwisata 4. Belum maksimalnya penerapan teknologi dan informasi yang komprehensif dalam pengelolaan data dan informasi kepariwisataan 5. Belum maksimalnya publikasi dan promosi kepariwisataan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada beberapa pelaksanaan kegiatan pameran yang sifatnya Overlapping (Tumpang Tindih) dengan OPD lain. 2. Belum adanya aturan daerah mengenai syarat, prosedur, sanksi dsb. Perijinan usaha kepariwisataan; sementara ini hanya mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009. 3. Masih minimnya pengetahuan SDM dibidang pelayanan wisata 4. Rendahnya perhatian pelaku usaha wisata 5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sampang 6. Kurang tersedianya waktu yang memadai untuk melakukan kunjungan wisata pada jam pelajaran di sekolah sehingga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sejumlah pelaku kerajinan, industri, souvenir, dan kuliner yang punya nilai jual tinggi untuk dipamerkan 2. Tumbuh kembangnya usaha kepariwisataan (hotel, penginapan, restoran, depot, warung kuliner, agen kepariwisataan, dsb) di Kabupaten Sampang. 3. Telah terbentuk beberapa kelompok sadar wisata sebagai pioner pelayanan wisatawan. 4. Telah terdaftar izin usaha kepariwisataan 5. Adanya keterbukaan masyarakat Sampang untuk menerima dan memberikan masukan terkait dengan pengembangan kepariwisataan 6. Kemajuan teknologi dan informasi dapat dijadikan sebagai

Visi : "Sampang Hebat Bermartabat"				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>perlu dilaksanakan di luar jam sekolah (ekstra kurikuler) dan hari libur sekolah (sesuai dengan kalender pendidikan)</p> <p>7. Keberadaan status tanah di masing-masing potensi destinasi pariwisata</p> <p>8. Masih rendahnya koordinasi antar OPD terkait dengan pengembangan kepariwisataan</p> <p>9. Belum dimasukkannya pembangunan pariwisata sebagai prioritas program</p>	<p>media promosi dan pemasaran</p> <p>7. Keseriusan Pemkab. Sampang untuk mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata</p> <p>8. Akses jalan utama/poros ke masing-masing destinasi cukup memadai</p> <p>9. Letak kabupaten Sampang yang berada di tengah-tengah pulau Madura yang sangat strategis.</p>
	<p>Program Aksi: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian dan keragaman budaya daerah, pelaku seni serta aktualisasi dan apresiasi tradisi, dan kesadaran tentang harmonisasi dan toleransi keragaman budaya.</p>	<p>1. Kurangnya informasi / data yang akurat tentang sejarah dan nilai tradisional,</p> <p>2, Kurang tersedianya data jenis-jenis Kesenian Tradisional Kabupaten Sampang yang hampir punah secara valid.</p> <p>3. Masih rendahnya "Kebutuhan" pelaku seni untuk berkreasi dan mengaktualisasikan kesenian mereka.</p> <p>4, Belum tergarapnya kesenian lokal Kabupaten Sampang yang mempunyai nilai jual sebagai pendukung pariwisata</p> <p>5. Kurang tersedianya eksibisi budaya dan pariwisata, baik ditingkat lokal , regional, maupun nasional.</p>	<p>1. Belum tergalinya nilai-nilai Budaya, sejarah dari orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang budaya, sejarah di Kabupaten Sampang</p> <p>2. Terdapat beberapa tokoh Agama dan tokoh masyarakat yang mempunyai keinginan untuk dihargai lebih tinggi dari yang lain.</p> <p>3. Masih adanya kesulitan untuk mengumpulkan pelaku-pelaku seni tradisional yang hampir punah</p> <p>4. Masih terdapat egosentris kelompok-kelompok dan pelaku seni</p> <p>5. Kurang intensifnya penggalian kesenian tradisional Kabupaten Sampang</p> <p>6. Masih adanya kesulitan untuk mengumpulkan pelaku-pelaku seni budaya (khususnya seni-budaya yang hampir punah) dan pariwisata khususnya Duta Wisata</p>	<p>1. Masih terdapat beberapa orang yang memahami tokoh-tokoh yang mempunyai peranan penting di Kabupaten Sampang.</p> <p>2. Masih dapat dirasakan adanya bagian-bagian kearifan lokal yang masih hidup di masyarakat.</p> <p>3. Masih terdapat beberapa orang pelaku kesenian tradisional yang terancam punah</p> <p>4. Masih terdapat SDM kesenian yang peduli dan mempunyai keinginan untuk pengembangan seni di Kabupaten Sampang</p> <p>5. Adanya sejumlah kecil pelaku seni budaya yang hampir punah, terbentuknya juru informasi wisata</p>

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Program Aksi: Peningkatan kompetensi, kreativitas dan prestasi pemuda dan olahraga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya penanganan permasalahan kepemudaan. Seperti : pengangguran dan kenakalan remaja. 2. Belum terlaksananya pembinaan bagi pemuda / organisasi kepemudaan secara optimal. 3. Dalam rangka pemassalan olahraga bagi masyarakat, khususnya di kegiatan senam masih kurang berminat. 4. Dalam penyeelenggaraan kompetisi olahraga pelajar, mahasiswa dan masyarakat masih belum optimal sehingga mempengaruhi pada pencapaian prestasi di bidang olahraga, rendahnya minat pembina/pelatih dan pelaku olahraga untuk terus meningkatkan prestasi dan prestasinya 5. Belum terdatanya sarana dan prasarana secara keseluruhan. 6. Belum terdatanya secara keseluruhan klub di 14 kecamatan. 7. Kurangnya kegiatan pengkajian dan evaluasi sarana dan prasarana olahraga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya tumpang tindih tupoksi dengan OPD lain perihal kepemudaan. 2. Belum dilibatkannya pemuda dibidang pembangunan politik dan hukum. 3. Rendahnya kepedulian pemuda dibidang sosial kemasyarakatan dan budaya daerah. 4. Belum meratanya kesadaran masyarakat membiasakan berolahraga. 5. Belum memadainya dan pemerataan sarana olahraga yang ada di kecamatan. 6. Rendahnya SDM bagi pembina/ pelatih / pelaku dan pelaku olahraga. 7. Banyaknya sarana dan prasarana olahraga yang sifatnya tidak permanent 8. Terbatasnya tenaga yang memadai untuk kegiatan sarana dan prasarana olahraga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirimkan beberapa pemuda untuk mengikuti pelatihan di tingkat propinsi, mengingat minat pemuda untuk berwirausaha cukup tinggi. 2. Dalam kegiatan tertentu diadakan kegiatan senam massal selain diprogramkan untuk tiap Jum'at minggu pertama diadakan senam bersama. 3. Memaksimalkan sarana dan parasarana yang ada. 4. Adanya pembina pelatih yang berpengalaman dan berlesensi. 5. Melaksanakan lomba dan pertandingan secara rutin dan terprogram. 6. Pelatihan secara bertahap diadakan pelatihan untuk peningkatan mutu bagi para pembina / pelatih dan pelaku olahraga 7. Minat masyarakat yang tinggi terhadap olahraga. 8. Banyaknya klub-klub baru yang bermunculan di Kecamatan. 9. Antusiasme masyarakat yang ada di kecamatan terhadap keberadaan sarana dan prasarana olahraga

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2023

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada telaahan ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kemenpora, Kemendikbud, Kemenparekraf dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra K / L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan	Kurangnya penanganan permasalahan kepemudaan. Seperti : pengangguran dan kenakalan remaja	Adanya tumpang tindih tupoksi dengan OPD lain perihal kepemudaan	Mengirimkan beberapa pemuda untuk mengikuti pelatihan di tingkat propinsi mengingat minat pemuda untuk berwirausaha cukup tinggi
2.	Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi Kepemudaan	Belum terlaksananya pembinaan bagi pemuda / organisasi kepemudaan secara optimal	Belum dilibatkannya pemuda dibidang pembangunan politik dan hukum	Banyaknya jumlah organisasi kepemudaan namun belum berbadan hukum sehingga belum bisa di optimalkan
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga	Dalam rangka pemassalan olahraga bagi masyarakat, khususnya di kegiatan senam masih kurang berminat	Belum meratanya kesadaran masyarakat membiasakan berolahraga	Dalam kegiatan tertentu diadakan kegiatan senam massal selain diprogramkan untuk tiap jumat minggu pertama diadakan senam bersama.
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional	Dalam penyeelenggaraan kompetisi olahraga pelajar, mahasiswa dan masyarakat masih belum optimal sehingga mempengaruhi pada pencapaian prestasi di bidang pemuda dan olahraga, rendahnya minat pembina/pelatih dan pelaku olahraga untuk terus meningkatkan prestasi dan prestasinya	Belum memadainya dan pemerataan sarana olahraga yang ada di kecamatan	Memaksimalkan sarana dan parasarana yang ada

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Meningkatnya internalisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai budaya yang mendukung pembangunan karakter dan pekerti bangsa.	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap peninggalan keurbakalaan dan pembelajaran tentang keurbakalaan di tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas kurang ada rasa kepedulian /kurang mendapatkan perhatian.	Belum adanya sosialisasi tentang aktualisasi nilai nilai sejarah dan budaya secara terpadu	Keberadaan situs mulai tergarap pemeliharaan /pelestariannya bisa menjadi pendorong berkembangnya industri wisata budaya untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan
6.	Meningkatnya inventarisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai tradisi	Belum tergalinya kearifan Budaya lokal di Kabupaten Sampang	Mindset masyarakat yang mudah mengikuti isu trendseter terbaru.	Banyaknya nilai kearifan lokal yang masih hanya dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu
7.	Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan bawah air	Penggalian Benda Cagar Budaya/Situs/ Kawasan Cagar Budaya tradisonal Kabupaten Sampang masih kurang intensif	Tidak ada tenaga ahli dibidang anthropologi dan arkheologi	Banyaknya jumlah benda cagar budaya yang baru ditemukan tetapi belum dipugar dan diteliti
8.	Meningkatnya destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi di pasar global	Temuan kawasan atau objek wisata di Sampang rata rata masih berupa potensi wisata dan belum tergarap sepenuhnya	Kurangnya sinergitas OPD yang terlibat	Keinginan menambah daya jual potensi wisata di Kabupaten Sampang
9.	Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan	Masih kuatnya pengaruh tokoh agama yang memberikan asumsi bahwa kegiatan wisata sebagian besar mengarah pada kegiatan pelanggaran norma agama	Pemahaman masyarakat lokal tentang kepariwisataan masih minim	Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat
10.	Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata	Minimnya investor yang mau menanamkan modal di Kabupaten Sampang	Kompetensi keahlian SDM lokal yang masih minim terutama di bidang Pariwisata	Banyak potensi wisata yang belum terolah
11.	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	Rendahnya jumlah kunjungan wisata dari wisatawan lokal maupun manca Negara	Belum terpenuhinya sarana prasarana wisata yang memadai	Kekayaan potensi wisata alam, budaya, kuliner dsb yang potensial

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2021

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS maka ditemukan banyak faktor pendukung serta penghambat terhadap pembuatan rencana tata ruang wilayah

terkait tugas dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang, maka sebagai penjabarannya dapat disimpulkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil Rekomendasi KLHS terkait Tugas dan Fungsi Disporabudpar	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ketersediaan fasilitas olahraga yang memenuhi standart dan merata penyebarannya	Fasilitas olahraga masih belum memenuhi standart dan belum merata penyebarannya	Sarana dan prasarana pendukung olahraga belum terpenuhi	Munculnya atlit olahraga yang berprestasi di berbagai cabang olahraga
2	Menumbuhkan kesadaran kelompok seni budaya untuk berperan aktif	Pengemasan atraksi budaya yang kurang menarik	Masih terdapat egosentris kelompok-kelompok dan pelaku seni	Meningkatnya jumlah group dan sanggar kesenian
3	Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sampang	Belum adanya program pengembangan sektor yang ada di Kabupaten Sampang secara keseluruhan. Hal ini terbukti dengan keberadaan objek-objek wisata yang masih belum banyak dikelola secara profesional.	Minimnya investor yang mau berinvestasi ke Sampang	Potensi wisata alam dan budaya Sampang mempunyai banyak keunggulan dibanding 3 kabupaten lain di Pulau Madura.

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2021

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil analisa layanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang yang terdiri dari analisis internal, analisis eksternal dan berbagai masukan dari pemangku kepentingan Kabupaten Sampang. Analisis internal merupakan analisis yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan arah ruang lingkup kinerja Disporabudpar Kabupaten Sampang. Sementara analisis eksternal meliputi analisis

perkembangan pengaruh kebijakan pemerintah yang terhadap bidang kerja Disporabudpar Kabupaten Sampang yang meliputi : Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Masukan dari *stakeholder* diperoleh melalui serangkaian *Focus Group Discussion* (FGD) dengan perwakilan *stakeholders* dari unsur Tokoh Kesenian, Budayawan, Pelaku industri Pariwisata, LSM, media massa, organisasi masyarakat. Berdasarkan analisis internal dan eksternal tersebut, dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Belum terciptanya kelompok pemuda yang kreatif dan mandiri;
- b. Prestasi pemuda dan olahraga belum tercapai maksimal di semua event kepemudaan dan olahraga;
- c. Peninggalan sejarah, seni dan budaya belum tergali dan terkelola secara optimal;
- d. Objek wisata belum terkelola secara maksimal;
- e. Rendahnya peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam strategi pengembangan dan pemasaran seni budaya dan pariwisata.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisis strategis serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu lima tahun. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu pada hasil penajaman visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Disporabudpar Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 2** pencapaian sasaran "**PDRB Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**", sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Disporabudpar Kabupaten Sampang dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PDRB sektor pariwisata dan ekonomi kreatif		Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman	1,04 R	1,41 R	2,65	3,05	3,46	3,97
		Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Rata-rata lama tinggal	-	-	-	55,46	72,10	77,64
		Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	Persentase peningkatan produktivitas ekonomi kreatif	-	-	-	70,67	72,40	73,72

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2023

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Rata-rata lama tinggal	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kamar tidur adalah bilik tempat tidur. Kamar Tidur merupakan ruang untuk istirahat serta ruang pribadi yang digunakan untuk melepas lelah atau tidur di siang dan malam hari. Menurut Dirjen Pariwisata – Depparpostel Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial $\frac{\text{jumlah kamar terjual per tahun}}{\text{jumlah ketersediaan kamar per tahun}} \times 100\%$	Data periodik hunian akomodasi	Bidang Pariwisata Bidang Kebudayaan Bidang Pemuda dan Olahraga
2.	Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	Persentase peningkatan produktivitas ekonomi kreatif	Pelaku ekonomi kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mencakup aktivitas produksi, distribusi baik barang dan jasa yang dalam proses pengerjaannya membutuhkan ide kreatif dan kemampuan intelektual (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019) $\frac{\text{jumlah pelaku ekraf tahun sekarang} - \text{jumlah pelaku ekraf tahun sebelumnya}}{\text{jumlah pelaku ekraf tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Data pelaku ekonomi kreatif per sub sektor (Data lintas sektor yang berkaitan dengan ekonomi kreatif)	Bidang Ekonomi Kreatif

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2023

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2024.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan Disporabudpar Kabupaten Sampang haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

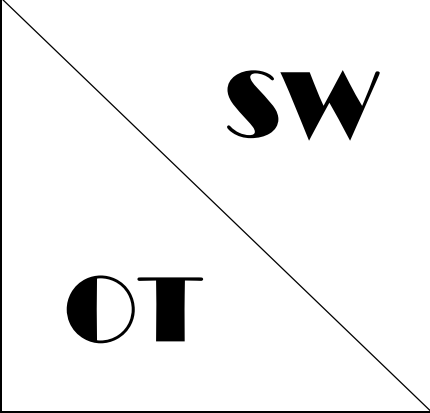
Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2019-2024

Visi : Sampang Hebat Bermartabat					
Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
T.2	Meningkatnya Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	S.6	Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengelolaan potensi wisata unggulan dan ekonomi kreatif	Peningkatan fasilitas serta pengembangan sarana dan prasarana di destinasi wisata unggulan dan ekonomi kreatif
				Meningkatkan SDM yang berkualitas, berdaya saing dan berprestasi dalam kepemudaan dan keolahragaan	Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui pengembangan dan pembinaan pemuda dan olahraga
				Meningkatkan toleransi dan harmonisasi kehidupan masyarakat dengan melestarikan seni budaya daerah	Menumbuh kembangkan kecintaan terhadap pelestarian seni dan budaya lokal

Sumber : Penajaman RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, 2023

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang

	<p><u>Kekuatan / Strength</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM berpotensi yang banyak 2. Banyaknya atlit berpotensi di daerah 3. Potensi kekayaan budaya lokal dan berkembangnya kreativitas ragam seni budaya dan terjaganya kearifan lokal 4. Potensi wisata dari sektor alam dan budaya yang sudah ada 	<p><u>Kelemahan / Weakness</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang berkeahlian dan berkeahlian rendah 2. Fasilitas olah raga masih belum memenuhi standart dan belum merata penyebarannya 3. Pengemasan atraksi budaya yang kurang menarik 4. Minimnya kapasitas tenaga ahli bidang budaya dan sejarah 5. Belum ada payung hukum yang mengatur kepariwisataan
<p><u>Peluang / Opportunity</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beragam jenis usaha untuk kegiatan wiraswasta 2. Munculnya atlit olahraga yang berprestasi di berbagai cabor 3. Meningkatnya jumlah group dan sanggar kesenian 4. Sektor pariwisata semakin berkembang 5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya angka pengangguran • Adanya pelatihan dan pembinaan ketrampilan wiraswasta • Pembinaan atlit berprestasi • Standarisasi sistem pelatihan dan pembinaan untuk atlit • Regenerasi seniman • Menyerap tenaga kerja dan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada penghargaan dan jaminan masa depan untuk atlit berprestasi • Data based jumlah ragam seni budaya belum terkumpul sepenuhnya • Kualitas pelayanan terhadap wisatawan yang rendah
<p><u>Ancaman / Threat</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan fasilitas yang dimiliki mengakibatkan banyak kegiatan kepemudaan yang tidak terakomodir dan tidak terpantau 2. Atlit berprestasi banyak yang pindah ke luar daerah dengan alasan kesejahteraan yang lebih baik 3. Persaingan antar group kesenian 4. Persaingan antar objek wisata dan pengembang industri pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan fasilitas Kepemudaan sebagai pusat pembinaan • Beasiswa atlit berprestasi • Formulasi strategi pengembangan yang tepat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar dan peluang usaha yang minim berbanding dengan jumlah wirausahawan yang banyak • Regenerasi atlit berhenti

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2021

Arah kebijakan merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, maka Arah Kebijakan Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan 2. Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	1. Pengembangan sistem promosi pariwisata 2. Pembinaan SDM pariwisata dan pelaku usaha wisata 3. Meningkatkan sarana dan prasarana destinasi wisata	1. Disusunnya dokumen teknis Raperda pariwisata 2. Mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan kemitraan di bidang pariwisata 3. Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata dengan mengedepankan <i>cleanliness, health, safety</i> dan <i>environment sustainable</i> (CHSE) sebagai penyesuaian aktivitas pariwisata di era new normal
		Membina, mengembangkan dan melestarikan seni budaya daerah	Menumbuh kembangkan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal
		1. Pengembangan kualitas SDM kepemudaan dan keolahragaan 2. Membina dan meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga 3. Pembinaan manajemen organisasi pemuda dan olahraga	1. Fasilitasi pelayanan kepemudaan dan pelatihan kewirausahaan pemuda bekerja sama dengan lintas sektor terkait 2. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga 3. Peningkatan organisasi kepemudaan dan olahraga

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2023

Inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi daerah merupakan terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara teknis, inovasi daerah ditempuh untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi serta untuk mempercepat pencapaian target kinerja pembangunan.

Selanjutnya beberapa inovasi yang digagas Disporabudpar Kabupaten Sampang yang akan dilaksanakan dan dikembangkan dalam rangka mempercepat pencapaian target kinerja dan/atau untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang diampu, antara lain :

1. Pembangunan Sampang Sport Center (SSC)
 - Optimalisasi pola pembinaan olahraga melalui sinergitas pemangku keolahragaan. Pembangunan SSC akan dilaksanakan di Kelurahan Dalpenang.
 - Kegiatan olahraga skala Provinsi dilaksanakan di Sampang (MICE).
2. Pengembangan Seni dan Budaya Daerah melalui *Pagelaran Pornama Epenggir Sereng*
 - Digitalisasi kegiatan rutin kelompok budaya daerah meliputi Komunitas/sanggar seni dan pegiat kebudayaan daerah.
 - *Broadcasting* kreatifitas Komunitas/sanggar seni dan pegiat kebudayaan daerah.
 - Pagelaran budaya dan seni di lokasi destinasi wisata.
3. Pengembangan Destinasi Wisata Baru
 - Kampung Adat Napo
 - Mangrove Marparan-Disanah
 - Agrowisata Melon
 - Lenggang Batik
 - Festival Desa

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Disporabudpar Kabupaten Sampang selama Tahun 2019-2024 merupakan program-program prioritas hasil Penajaman Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Disporabudpar Kabupaten Sampang. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirumuskan di Perubahan Renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Pada Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang sebelum perubahan, telah disusun serangkaian rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2019-2024. Selanjutnya dengan ditetapkannya hasil Penajaman Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang yang diikuti Perubahan Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang, maka perlu dilakukan penyesuaian serta penataan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran Disporabudpar Kabupaten Sampang. Penyesuaian serta penataan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dilakukan dengan beberapa pertimbangan diantaranya perlunya penyesuaian nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah serta desain kelembagaan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga perlu penyesuaian nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah serta desain kelembagaan daerah.

Penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DISPORABUDPAR
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN								TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.			Kinerja	Rp.
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA LAMA (2018-2020)																								
Meningkatnya daya saing dan peran serta pemuda dalam pembangunan				Persentase peningkatan prestasi pemuda di tingkat nasional	%	8.00	107.69		-94.44											-94.44				
	Meningkatkan prestasi pemuda dalam pembangunan dan olahraga			Persentase prestasi pemuda pada event kepemudaan	%	44.44	76.19		57.14											57.14				
				Persentase prestasi olahraga	%	52.00	291.30		75.00											75.00				
		2.13.2.13.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100.00	100.00	572,009,211	99.76	686,856,651										99.88	1,258,865,862			
		2.13.2.13.01.01.01.	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah surat terkirim	surat	1099	1398	404,788,328	832	503,526,765										2230	908,315,093			
				Jumlah pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	bulan	12	12		12											24				
				Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	unit	23	17		20											37				
				Jumlah tenaga kebersihan	ob	5	54		52											106				
				Jumlah pemenuhan bahan bacaan	exs	24	36		12											48				
				Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	ob	737	707		857											1564				
				Jumlah tenaga kontrak daerah	ob	11	126		120											246				
		2.13.2.13.01.01.02.	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK	buah	670	1113	88,008,100	1427	73,298,350										2540	161,306,450			
				Jumlah barang cetakan	buah	567	665		997											1662				
				Jumlah barang penggantian	lembar	75,000	54,265		71,183											125,448				
				Jumlah komponen instalasi listrik	buah	297	284		128											412				
				Jumlah alat kebersihan yang disediakan	buah	182	202		237											439				
		2.13.2.13.01.01.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	ok	3	0	79,212,783	16	110,031,536										16	189,244,319			
				Jumlah koordinasi luar daerah	ok	157	56		40											96				
		2.13.2.13.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Anazatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100.00	100.00	127,776,900	86.75	81,114,986										93.38	208,891,886			
		2.13.2.13.01.02.01.	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	unit	0	0	30,590,000	0	2,762,000										0	33,352,000			
				Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	1	1		1											2				
		2.13.2.13.01.02.03.	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan	unit	0	0	45,611,400	0	46,396,986										0	92,008,386			
				Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan	unit	0	0		0											0				
				Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara	unit	4	4		4											8				
		2.13.2.13.01.02.04.	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	unit	2	2	51,575,500	4	31,956,000										6	83,531,500			
				Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	unit	66	37		38											75				
				Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	unit	11	12		5											17				
				Jumlah spanduk/ umbul-umbul/bendera yang disediakan	buah	20	18		20											38				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN								TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.13.2.13.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	%	100.00	0	0	0	0									0	0		
		2.13.2.13.01.03.01.	Pelaksanaan Bintek/ Sosialisasi/Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti bintek/ sosialisasi /seminar	ASN	1	0	0	0	0									0	0		
		2.13.2.13.01.04.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	%	100.00	100.00	43,106,000	91.67	29,977,500									95.84	73,083,500		
		2.13.2.13.01.04.01.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisk/Non Fisk, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJP	dok	5	6	14,560,000	6	14,981,500									12	29,541,500		
		2.13.2.13.01.04.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penguasaan	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	dok	3	4	14,996,000	4	14,996,000									8	29,992,000		
		2.13.2.13.01.04.03.	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen SKM	dok	1	1	13,550,000	1	0									2	13,550,000		
				Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	kali	0	1		0										1			
		2.13.2.13.01.15.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kenemudaan	Persentase organisasi kepemudaan aktif	%	80.65	83.87	1,338,165,700	83.87	111,626,300									83.87	1,449,792,000		
				Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional	pemuda	8	16		4										4			
		2.13.2.13.01.15.01.	Pembinaan dan peningkatan kapasitas pemuda	Sosialisasi pencegahan narkoba dikalangan remaja	remaja (Napza)	40	42	324,693,500	50	6,991,300									92	331,684,800		
				Jumlah kader pemuda yang mengikuti lomba foto essay	pemuda	0	0		0										0			
				Seleksi kapal pemuda nusantara dan pertukaran pemuda antar propinsi	pemuda	0	0		0										0			
				Duta pemuda JPD	pemuda	0	84		0										84			
				Pembinaan organisasi kepemudaan	OKP	25	26		1										27			
		2.13.2.13.01.15.02.	Pemberdayaan dan peningkatan kreativitas Pemuda	Jumlah peserta diklat dasar kepemimpinan	pemuda	480	575	840,214,700	6	104,635,000									581	944,849,700		
				Jumlah pemuda pelopor	pemuda	0	0		0										0			
				Jumlah pemuda yang difasilitasi pada penyelenggaraan kreatifitas pemuda	pemuda	0	0		0										0			
				Drumband	pemuda	0	0		0										0			
		2.13.2.13.01.15.03.	Pengembangan kapasitas pemuda	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan dan memperoleh fasilitasi akses permodalan	wirausaha	234	87	173,257,500	0	0									87	173,257,500		
				Pameran prestasi karya pemuda	pemuda	0	0		0										0			
				Sarana dan prasarana kepemudaan	unit	0	0		0										0			
		2.13.2.13.01.16.	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Jumlah prestasi olah raga tingkat regional, nasional dan internasional	prestasi	78	201	16,223,371,682	6	20,232,438,490									6	36,455,810,172		
		2.13.2.13.01.16.01.	Pembinaan olahraga prestasi	Kompetisi olahraga Uerjang SD, SMP & SMA/ SMK Tingkat Kab & Provinsi	cabor	19	19	364,367,500	4	96,360,000									23	460,727,500		
				Diklat tentang perwasitan dan kepelatihan	peserta	100	100		0										100			
				Pembinaan usia dini	peserta	0	40		40										80			
		2.13.2.13.01.16.02.	Pembinaan olahraga rekreasi	Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan	9	22	429,780,500	3	49,865,000									25	479,645,500		
		2.13.2.13.01.16.03.	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	Terbanggunnya sarana dan prasarana olahraga yang dapat mendukung peningkatan prestasi olahraga	paket	6	1	15,429,223,682	1	20,086,213,490									2	35,515,437,172		
				Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga yang layak pakai	unit	10	10		10										20			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN								TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan				Persentase budaya daerah yang dilestarikan	%	35,71	40,48		45,25										45,25			
	Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah			Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	budaya	15	17		19										19			
		2.16.2.13.01.15.	Program pengelolaan budaya daerah	Persentase kelompok budaya daerah yang aktif	%	15,00	28,39	1,772,586,866	10,74	568,032,162									10,74	2,340,619,028		
		2.16.2.13.01.15.01.	Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah	Rangkaian peringatan Hari Jadi Sampang	kegiatan	6	8	1,371,745,366	0	0									8	1,371,745,366		
				Festival musik tradisional																		
				Pagelaran kesenian dalam dan luar daerah																		
				Pagelaran kesenian yang hampir punah																		
				Festival kesenian pesisir utara																		
				Festival karya tari																		
		2.16.2.13.01.15.02.	Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan	Paduan suara (AUBADE)	paket	10	5	400,841,500	1	301,076,000									6	701,917,500		
		2.16.2.13.01.15.03.	Pengembangan seni dan budaya daerah	Tersedianya pemeliharaan serta pelestarian situs benda cagar budaya	kegiatan	0	0	0	2	189,771,315									2	189,771,315		
				Festival Kesenian Pesisir Utara																		
				Festival Karya Tari Daerah																		
				Festival Sampang Tempo Doeloe																		
		2.16.2.13.01.15.04.	Pembinaan dan pelestarian sejarah lokal dan nilai adat istiadat tradisional	Rangkaian peringatan Hari Jadi Sampang ke 397 : A. Ziarah Makam Leluhur, B. Pawai Budaya, C. Resepsi	kegiatan	0	0	0	1	77,184,847									1	77,184,847		
				Festival Musik Tradisional																		
Meningkatkan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif				Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	%	154,11	167,76		-93,28										-93,28			
	Meningkatnya pengelolaan potensi wisata unggulan			Jumlah kunjungan wisata	orang	314,552	842,241		56,633										56,633			
		3.02.2.13.01.15.	Program Pengembangan Pariwisata Daerah	Persentase pokdarwis aktif	%	25,00	37,50	3,044,650,727	75,00	2,965,367,642									75,00	6,010,018,369		
				Jumlah obyek destinasi tujuan wisata (ODTW) baru	destinasi	9	9		8										8			
				Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata	%	16,67	242,86		-29,17											-29,17		
		3.02.2.13.01.15.01.	Peningkatan dan pengelolaan pariwisata daerah	Terpromosikannya destinasi, potensi wisata dan atraksi wisata Kab. Sampang	keg	8	10	876,475,899	0	0									10	876,475,899		
				SDM pariwisata yang terbina dan terlihat	keg	0	2		0										2			
		3.02.2.13.01.15.02.	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	Destinasi wisata yang layak jual	destinasi	9	9	2,168,174,828	0	0									9	2,168,174,828		
				Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	paket	6	6		0										6			
		3.02.2.13.01.15.03.	Pemasaran dan informasi wisata	Terpromosikannya destinasi, potensi wisata dan atraksi wisata Kab. Sampang dan tersedianya informasi pendukung wisata	kegiatan	0	0	0	4	348,577,300									4	348,577,300		
		3.02.2.13.01.15.04.	Pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata	Destinasi wisata yang layak jual	destinasi	0	0	0	8	2,272,875,300									8	2,272,875,300		
				Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata	paket	0	0		9										9			
		3.02.2.13.01.15.05.	Pengembangan SDM dan usaha pariwisata	SDM pariwisata yang berkualitas dan usaha pariwisata yang terstandar	kegiatan	0	0	0	3	343,915,042									3	343,915,042		
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERUBAHAN RENSTRA (2021)																						

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN								TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.			Kinerja	Rp.
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA																								
Meningkatnya kapasitas dan daya saing kepemudaan dan keolahrahaan				Persentase peningkatan prestasi kepemudaan dan keolahrahaan di tingkat nasional	%						866.67								70.00					
	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga			Persentase prestasi pemuda pada event kenemudaan	%						50.00								72.73					
				Persentase prestasi olahraga pada event keolahrahaan	%						288.89								81.82					
		2.19.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	%						86.32	3,847,222,462							86.32	3,847,222,462				
		2.19.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%						100.00	22,004,000							100.00	22,004,000				
		2.19.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen						3	3,984,000							3	3,984,000				
				Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah***	dokumen						0								0					
		2.19.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	dokumen						1	4,259,000							1	4,259,000				
				Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD***	dokumen						0								0					
		2.19.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	dokumen						1	3,256,000							1	3,256,000				
				Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD***	dokumen						0								0					
		2.19.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	dokumen						1	4,667,000							1	4,667,000				
				Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD***	dokumen						0								0					
		2.19.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	dokumen						1	3,450,000							1	3,450,000				
				Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD***	dokumen						0								0					
		2.19.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah (LKPJ, LPPD, LKIP dan RB)	dokumen						4	2,388,000							4	2,388,000				
				Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah***	laporan						0								0					
		2.19.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah	%						100.57	2,991,609,509							100.57	2,991,609,509				
		2.19.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	ASN						28	2,970,107,409							28	2,970,107,409				
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN***	orang/bulan						0								0					
		2.19.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah alat tulis kantor	buah						654	15,986,600							654	15,986,600				
		2.19.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	dokumen						1	2,277,000							1	2,277,000				
				Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD***	laporan						0								0					

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN								TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.19.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran / SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran yang disusun	dokumen						18	3.238,500							18	3.238,500		
				Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD***	laporan						0								0			
		2.19.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek / sosialisasi peraturan perundang-undangan	%						0	193,304,300							0,00	193,304,300		
		2.19.01.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi tatap muka	kali / kegiatan						12	193,304,300							12	193,304,300		
				Jumlah peserta sosialisasi	orang						600								600			
				Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan***	orang						0								0			
		2.19.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	ASN						0	0							0	0		
				Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang- Undangan***	orang						0								0			
		2.19.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	%						60,94	144,758,313							60,94	144,758,313		
		2.19.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	buah						98	11,123,000							98	11,123,000		
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan***	paket						0								0			
		2.19.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	buah						325	15,369,600							325	15,369,600		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan***	paket						0								0			
		2.19.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor	buah						0	0							0	0		
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan***	paket						0								0			
		2.19.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	buah						448	21,684,500							448	21,684,500		
				Jumlah barang penggandaan yang disediakan	lembar						60,970								60,970			
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan***	paket						0								0			
		2.19.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	exsampler						12	1,560,000							12	1,560,000		
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan***	dokumen						0								0			
		2.19.01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	orang						419	4,654,300							419	4,654,300		
				Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu***	laporan						0								0			
		2.19.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	orang						3	90,366,913							3	90,366,913		
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	orang						90								90			
				Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	orang						74								74			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN								TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD***	laporan						0								0			
		2.19.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%						100.00	162,925,175							100.00	162,925,175		
		2.19.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	unit						0	0							0	0		
				Jumlah pengadaan kendaraan dinas R2	unit						0								0			
				Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan***	unit						0								0			
		2.19.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meublair	buah						1	5,180,175							1	5,180,175		
				Jumlah paket mebel yang disediakan***	unit						0								0			
		2.19.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit						19	157,745,000							19	157,745,000		
				Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan***	unit						0								0			
		2.19.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	%						103.85	215,499,668							103.85	215,499,668		
		2.19.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menvurat	Jumlah surat yang terkirim	surat						1,039	10,681,500							1,039	10,681,500		
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menvurat***	laporan						0								0			
		2.19.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	bulan						12	159,818,168							12	159,818,168		
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan***	laporan						0								0			
		2.19.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	macam						1	45,000,000							1	45,000,000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan***	laporan						0								0			
		2.19.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	%						38.79	117,121,497							38.79	117,121,497		
		2.19.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapatkan perizinan kendaraan	unit						19	46,785,497							19	46,785,497		
				Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	unit						4								4			
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya***	unit						0								0			
		2.19.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meublair yang dipelihara	buah						2	2,300,000							2	2,300,000		
				Jumlah mebel yang dipelihara***	unit						0								0			
		2.19.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	buah						19	8,240,000							19	8,240,000		
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara***	unit						0								0			
		2.19.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit						1	59,796,000							1	59,796,000		
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi***	unit						0								0			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN								TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.			Kinerja	Rp.
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		2.19.01.2.13.	Penataan Organisasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Publik yang baik	%						100,00	0							100,00	0				
		2.19.01.2.13.02.	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	dokumen						1	0							1	0				
				Jumlah promosi pelayanan publik Perangkat Daerah	kali						0								0					
				Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana***	laporan						0								0					
		2.19.02.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kenemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	OKP						18	595,402,044							18	595,402,044				
				Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional	pemuda						2								2					
		2.19.02.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader	Jumlah pemuda yang dibina dalam pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kader pemuda	pemuda						128	302,162,261							128	302,162,261				
		2.19.02.2.01.07.	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah duta pemuda JPD	pemuda						110	148,398,411							110	148,398,411				
				Jumlah kader pemuda yang mengikuti lomba foto essay	pemuda						0								0					
				Jumlah pemuda yang mengikuti pameran karya pemuda	wirausaha muda						0								0					
				Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi kapal pemuda nusantara dan pertukaran pemuda antar provinsi	pemuda						0								0					
				Jumlah pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi penerima penghargaan***	orang						0								0					
		2.19.02.2.01.08.	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda pelopor	pemuda						13	153,763,850							13	153,763,850				
				Jumlah peserta diklat dasar kepemimpinan	pemuda						5								5					
				Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan***	orang						0								0					
		2.19.02.2.02.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi kepemudaan yang telah difasilitasi untuk peningkatan kapasitas pemuda	OKP						18	293,239,783							18	293,239,783				
		2.19.02.2.02.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan dan memperoleh fasilitasi akses permodalan	wirausaha muda						0	0							0	0				
				Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha***	orang						0								0					
		2.19.02.2.02.02.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan dan pelatihan drumband	pemuda						0	293,239,783							0	293,239,783				
				Jumlah pemuda yang difasilitasi pada penyelenggaraan kreatifitas pemuda	pemuda						90								90					
				Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	OKP						18								18					

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN								TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan***	dokumen						0								0			
		2.19.03.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional	prestasi						52	9,480,023,393							52	9,480,023,393		
		2.19.03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang mendukung peningkatan prestasi olahraga	unit						10	7,424,580,848							10	7,424,580,848		
		2.19.03.2.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	unit						4	7,424,580,848							4	7,424,580,848		
				Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	unit						2								2			
				Jumlah sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan***	unit						0								0			
		2.19.03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	multi event						0	1,765,384,000							0	1,765,384,000		
		2.19.03.2.02.01.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	multi event						0	1,765,384,000							0	1,765,384,000		
				Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan multi event dan single event Tingkat Kabupaten/Kota***	dokumen						0								0			
		2.19.03.2.02.03.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah kejuaraan olahraga yang diikuti	multi event						0	0							0	0		
				Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan***	orang						0								0			
		2.19.03.2.05.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan	jenis						4	290,058,545							4	290,058,545		
		2.19.03.2.05.01.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan olahraga	kegiatan						12	290,058,545							12	290,058,545		
				Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi***	dokumen						0								0			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																						
Meningkatnya nilai-nilai budaya daerah yang dilestarikan				Persentase budaya daerah yang dilestarikan	%						50.00								50.00			
Meningkatnya pengembangan dan pelestarian budaya daerah				Persentase kelompok budaya daerah yang aktif	%						16.62								16.62			
		2.22.02.	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	budaya						21	530,145,415							21	530,145,415		
		2.22.02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni budaya yang aktif	kelompok budaya						4	175,657,228							4	175,657,228		
		2.22.02.2.01.02.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah pembinaan dan pengembangan seni budaya	kegiatan						1	175,657,228							1	175,657,228		
				Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan***	orang						0								0			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN								TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja Rp.	Kinerja Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.22.02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah adat tradisional yang dilestarikan	adat tradisional						2	354,488,187							2	354,488,187		
		2.22.02.2.02.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah event budaya yang dilaksanakan	kegiatan						2	354,488,187							2	354,488,187		
				Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan***	objek						0								0			
		2.22.03.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah tradisi budaya yang dibina	tradisi budaya						2	67,108,088							2	67,108,088		
		2.22.03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah seniman / pelaku seni yang aktif	kelompok seni						12	67,108,088							12	67,108,088		
		2.22.03.2.01.01.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah event seni budaya yang diikuti	kegiatan						1	67,108,088							1	67,108,088		
				Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)***	orang						0								0			
		2.22.05.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%						62.50	497,587,400							62.50	497,587,400		
		2.22.05.2.02.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah situs / cagar budaya yang dilestarikan	situs						2	497,587,400							2	497,587,400		
		2.22.05.2.02.01.	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah peningkatan pelestarian situs / cagar budaya	paket						3	497,587,400							3	497,587,400		
				Jumlah situs / cagar budaya yang dilestarikan / dipelihara	paket						1								1			
				Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi***	objek						0								0			
		2.22.06.	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase benda cagar budaya yang dikelola museum	%						82.69	59,939,300							82.69	59,939,300		
		2.22.06.2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah benda cagar budaya (BCB) yang dikelola	buah						43	59,939,300							43	59,939,300		
		2.22.06.2.01.04.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah gedung museum yang dipelihara	unit						1	59,939,300							1	59,939,300		
				Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia dan terpelihara***	unit						0								0			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																						
	Meningkatnya pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif			Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	%						103.71								103.71			
				Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	%						506.06								506.06			
	Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif			Jumlah kunjungan wisata	orang						115,369								115,369			
				Jumlah pelaku ekonomi kreatif	pelaku ekonomi kreatif						200								200			
		3.26.02.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah obyek destinasi wisata	destinasi						10	684,790,425							10	684,790,425		
		3.26.02.2.01.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang layak jual	destinasi						6	0							6	0		
		3.26.02.2.01.02.	Perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan daya tarik wisata yang dikembangkan	dokumen						0	0							0	0		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN								TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota***	dokumen						0								0			
		3.26.02.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah destinasi wisata dikelola	destinasi						4	684,790,425							4	684,790,425		
		3.26.02.2.03.03.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	destinasi						2	612,272,300							2	612,272,300		
				Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)***	lokasi						0								0			
		3.26.02.2.03.04.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan pendukung sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata	paket						0	10,720,625							0	10,720,625		
				Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata	destinasi						2								2			
				Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara***	unit						0								0			
		3.26.02.2.03.06.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola destinasi wisata yang kompeten	orang						20	61,797,500							20	61,797,500		
				Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota***	laporan						0								0			
		3.26.03.	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah promosi dan informasi pariwisata	tayang						72	519,190,000							72	519,190,000		
		3.26.03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan	event						1	519,190,000							1	519,190,000		
				Jumlah event pariwisata yang diikuti	event						1								1			
		3.26.03.2.01.02.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi destinasi, potensi dan atraksi wisata yang dilaksanakan	kegiatan						1	141,017,500							1	141,017,500		
				Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri***	laporan						0								0			
		3.26.03.2.01.03.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah data dan informasi yang dicetak offline	lembar						2,365	254,242,500							2,365	254,242,500		
				Jumlah data dan informasi yang terbit online	oter						22								22			
				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota, baik dalam dan luar negeri***	dokumen						0								0			
		3.26.03.2.01.04.	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah mitra pelaku promosi wisata	mitra						1	123,930,000							1	123,930,000		
				Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri***	dokumen						0								0			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN								TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.						
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)				
		3.26.05.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata	%						5.88	403,375,500							5.88	403,375,500						
				Persentase pokdarwis aktif	%						100.00								100.00							
				Jumlah pelatihan keterampilan SDM narwisata	pelatihan						1								1							
		3.26.05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku usaha yang kompeten dan mampu menggerakkan ekonomi kreatif	orang						40	403,375,500							40	403,375,500						
		3.26.05.2.01.01.	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang pariwisata yang berkembang	pelaku usaha						0	51,599,000							0	51,599,000						
				Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan kompetensinya***	orang						0								0							
		3.26.05.2.01.03.	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa)	Jumlah SDM pariwisata yang kompeten dan berkualitas	orang						20	81,819,000							20	81,819,000						
				Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa)***	orang						0								0							
		3.26.05.2.01.06.	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pariwisata yang kompeten dan bersertifikasi	orang bersertifikat						20	269,957,500							20	269,957,500						
				Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif**	orang						0								0							
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERUBAHAN RENSTRA (2023-2024)																										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																										
				Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	%										3.05				3.46			3.97				
				Rata-rata lama tinggal	%										26.28				72.10			77.64				
				Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan																						
		3.26.02.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah obyek destinasi wisata	destinasi										12	645,865,794			14	1,147,830,415			16	1,198,289,973	16	2,991,986,182
		3.26.02.2.01.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang layak jual	destinasi										0	0	5	150,000,000	5	150,000,000	5	300,000,000				
		3.26.02.2.01.02.	Perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata yang dikembangkan	dokumen										0	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0	300,000,000				
				Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota**	dokumen										0		3		3			6				
		3.26.02.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah destinasi wisata dikelola	destinasi										2	645,865,794			3	997,830,415			5	1,048,289,973	5	2,691,986,182
		3.26.02.2.03.03.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	destinasi										2	454,753,624			0	500,000,000			0	398,289,973	2	1,353,043,597
				Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)***	lokasi										0				3			3		6		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN								TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.			Kinerja	Rp.
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		3.26.02.2.03.04.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan pendukung sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata	paket								1	191.112,170	0	347,830,415	0	500,000,000	1	1,038,942,585				
				Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata	destinasi								0		0		0		0					
				Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara***	unit								0		2		2		4					
		3.26.02.2.03.06.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola destinasi wisata yang kompeten	orang								0	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0	300,000,000				
				Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota***	laporan								0		1		1		2					
		3.26.03.	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah promosi dan informasi pariwisata	tayang								125	163,199,750	130	570,028,908	137	595,087,842	137	1,328,316,500				
		3.26.03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan	event								3	163,199,750	4	570,028,908	4	595,087,842	11	1,328,316,500				
				Jumlah event pariwisata yang diikuti	event								0		4		4		8					
		3.26.03.2.01.02.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi destinasi, potensi dan atraksi wisata yang dilaksanakan	kegiatan								2	34,931,750	0	190,028,908	0	195,087,842	2	420,048,500				
				Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri***	laporan								0		8		8		16					
		3.26.03.2.01.03.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah data dan informasi yang dicetak offline	lembar								0	128,268,000	0	180,000,000	0	180,000,000	0	488,268,000				
				Jumlah data dan informasi yang terbit online	oter								47		0		0		47					
				Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota, baik dalam dan luar negeri***	dokumen								0		4		4		8					
		3.26.03.2.01.04.	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah mitra pelaku promosi wisata	mitra								0	0	0	200,000,000	0	220,000,000	0	420,000,000				
				Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri***	dokumen								0		1		2		3					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																								
		2.19.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	%								97.23	3,767,726,700	100.00	4,291,407,449	100.00	4,480,061,207	99.08	12,539,195,356				
		2.19.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	%								90.91	15,790,000	100.00	38,000,000	100.00	42,250,000	96.97	96,040,000				
		2.19.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen								3	938,000	0	5,500,000	0	6,750,000	3	13,188,000				
				Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah***	dokumen								0		3		3		6					
		2.19.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	dokumen								1	3,911,000	0	9,500,000	0	11,500,000	1	24,911,000				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN								TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.			Kinerja	Rp.
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD***	dokumen								0		1		1		2					
		2.19.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	dokumen								1	2,587,000	0	4,500,000	0	4,500,000	1	11,587,000				
				Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD***	dokumen								0		1		1		2					
		2.19.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	dokumen								1	4,204,000	0	7,500,000	0	8,500,000	1	20,204,000				
				Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD***	dokumen								0		1		1		2					
		2.19.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	dokumen								1	3,245,000	0	4,500,000	0	4,500,000	1	12,245,000				
				Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD***	dokumen								0		1		1		2					
		2.19.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah (LKPJ, LPPD, LKIP dan RB)	dokumen								3	905,000	0	6,500,000	0	6,500,000	3	13,905,000				
				Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	laporan								0		4		4		8					
		2.19.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah	%								93.62	3,137,247,488	100.00	3,366,641,377	100.00	3,388,705,139	97.87	9,892,594,004				
		2.19.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan	ASN								25	3,136,072,988	0	3,361,291,377	0	3,382,705,139.00	25	9,880,069,504				
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN***	orang/bulan								0		29		30		59					
		2.19.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	dokumen								1	749,500	0	2,250,000	0	2,500,000	1	5,499,500				
				Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD***	laporan								0		1		1		2					
		2.19.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran yang disusun	dokumen								18	425,000	0.00	3,100,000	0.00	3,500,000	18	7,025,000				
				Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD***	laporan								0		18.00		18.00		36					
		2.19.01.2.05.	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek / sosialisasi peraturan perundang-undangan	%								0	92,731,140	6.9	27,589,000	9.68	27,589,000	5.53	147,909,140				
		2.19.01.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi tatap muka	kali / kegiatan								1	92,731,140	0	0	0	0	1	92,731,140				
				Jumlah peserta sosialisasi	orang								75		0	0	0	0	75					
				Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan***	orang								0		0		0		0					
		2.19.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	ASN								0	0	0	27,589,000	0	27,589,000	0	55,178,000				
				Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan***	orang								0		2		3		5					

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN								TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		2.19.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	%								54.72	146,449,039	100.00	212,750,000	100.00	272,430,000	84.91	631,629,039		
		2.19.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	buah								23	1,323,000	0	9,250,000	0	8,500,000	23	19,073,000		
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan**	paket								0		262		262		524			
		2.19.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	buah								92	12,176,500	0	21,250,000	0	21,500,000	92	54,926,500		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan***	paket								0		334		350		684			
		2.19.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor	buah								266	8,880,800	0	31,500,000	0	33,500,000	266	73,880,800		
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan***	paket								0		8,657		9,000		17657			
		2.19.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	buah								86	2,519,500	0	26,500,000	0	28,500,000	86	57,519,500		
				Jumlah barang penggandaan yang disediakan	lembar								4,045		0		0		4045			
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan***	paket								0		535		550		1085			
		2.19.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	exsampler								12	1,560,000	0	4,250,000	0	4,680,000	12	10,490,000		
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan***	dokumen								0		4		4		8			
		2.19.01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	orang								118	1,647,800	0	6,600,000	0	6,600,000	118	14,847,800		
				Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu***	laporan								0		4		4		8			
		2.19.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	orang								7	118,341,439	0	113,400,000	0	169,150,000	7	400,891,439		
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	orang								86		0		0		86			
				Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	orang								602		0		0		602			
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD***	laporan								0		83		90		173			
		2.19.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%								116.67	120,300,000	100.00	265,000,000	100.00	144,000,000	105.56	529,300,000		
		2.19.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	unit								1	108,000,000	0	215,000,000	0	132,000,000	1	455,000,000		
				Jumlah pengadaan kendaraan dinas R2	unit								0		0		0		0			
				Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan**	unit								0		26		26		52			
		2.19.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meublar	buah								0	0	0	7,500,000	0	0	0	7,500,000		
				Jumlah paket mebel yang disediakan***	unit								0		2		0		2			
		2.19.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit								6	12,300,000	0	42,500,000	0	12,000,000	6	66,800,000		
				Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan***	unit								0		4		8		12			
		2.19.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	%								98.80	181,163,087	100.00	271,247,072	100.00	399,337,068	99.60	851,747,227		
		2.19.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	surat								889	2,771,000	0	22,250,000	0	22,500,000	889	47,521,000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN								TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat***	laporan								0		4		4		8			
		2.19.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	bulan								12	133,392,087	0	124,997,072	0	249,837,068	12	508,226,227		
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan***	laporan								0		12		12		24			
		2.19.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	macam								2	45,000,000	0	124,000,000	0	127,000,000	2	296,000,000		
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan***	laporan								0		12		12		24			
		2.19.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Dinelihara	%								134.88	73,422,946	100.00	86,680,000	100.00	179,000,000	111.63	339,102,946		
		2.19.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapatkan perizinan kendaraan	unit								18	46,533,250	0	53,250,000	0	54,500,000	18	154,283,250		
				Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	unit								3		0		0		3			
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan***	unit								0		23		23		46			
		2.19.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubair yang dipelihara	buah								0	0	0	6,080,000	0	8,500,000	0	14,580,000		
				Jumlah mebel yang dipelihara***	unit								0		22		12		34			
		2.19.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	buah								36	8,530,000	0	12,350,000	0	15,500,000	36	36,380,000		
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara***	unit								0		45		65		110			
		2.19.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit								1	18,359,696	0	15,000,000	0	100,500,000	1	133,859,696		
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi***	unit								0		1		1		1			
		2.19.01.2.13.	Penataan Organisasi	Persentase Fasilitas Pelayanan Publik yang Baik	%								100.00	623,000	100.00	23,500,000	100.00	26,750,000	100.00	50,873,000		
		2.19.01.2.13.02.	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	dokumen								1	623,000	0	23,500,000	0	26,750,000	1	50,873,000		
				Jumlah promosi pelayanan publik Perangkat Daerah	kali								0		0		0		0			
				Jumlah laporan hasil fasilitas pelayanan publik dan tata laksana***	laporan								0		1		1		2			
		2.19.02.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kenemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	OKP								22	494,165,488	21	746,750,389	22	779,578,142	22	2,020,494,019		
				Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional	pemuda								3		7		8		8			
		2.19.02.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader	Jumlah pemuda yang dibina dalam pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kader pemuda	pemuda								76	124,549,278	85	585,030,389	87	589,578,142	248	1,299,157,809		
		2.19.02.2.01.07.	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah duta pemuda JPD	pemuda								0	0	0	90,750,389	0	91,578,142	0	182,328,531		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN								TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Jumlah kader pemuda yang mengikuti lomba foto essay	pemuda								0		0		0		0			
				Jumlah pemuda yang mengikuti pameran karya pemuda	wirausaha muda								0		0		0		0			
				Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi kapal pemuda nusantara dan pertukaran pemuda antar provinsi	pemuda								0		0		0		0			
				Jumlah pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi penerima penghargaan***	orang								0		7		8		8			
		2.19.02.2.01.08.	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda pelopor	pemuda								0	124,549,278	0	494,280,000	0	498,000,000	0	1,116,829,278		
				Jumlah peserta diklat dasar kepemimpinan	pemuda								76		0		0		76			
				Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan***	orang								0		85		87		172			
		2.19.02.2.02.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang telah difasilitasi untuk peningkatan kapasitas pemuda	OKP								22	369,616,210	21	161,720,000	22	190,000,000	22	721,336,210		
		2.19.02.2.02.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan dan memperoleh fasilitasi akses permodalan	wirausaha muda								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha***	orang								0		0		0		0			
		2.19.02.2.02.02.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan dan pelatihan drumband	pemuda								0	369,616,210	0	161,720,000	0	190,000,000	0	721,336,210		
				Jumlah pemuda yang difasilitasi pada penyelenggaraan kreatifitas pemuda	pemuda								0		0		0		0			
				Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	OKP								22		0		0		20			
				Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan***	dokumen								0		21		22		22			
		2.19.03.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional, nasional dan internasional	prestasi								41	10,328,879,690	35	2,292,099,070	45	2,392,861,607	45	15,013,840,367		
		2.19.03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang mendukung peningkatan prestasi olahraga	unit								15	7,579,081,340	6	149,554,682	8	260,380,393	8	7,989,016,415		
		2.19.03.2.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	unit								5	7,579,081,340	0	149,554,682	0	260,380,393	5	7,989,016,415		
				Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	unit								2		0		0		2			
				Jumlah sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan***	unit								0		14		16		16			
		2.19.03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	multi event								1	2,523,100,300	2	1,876,925,212	3	1,876,861,607	6	6,276,887,119		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN								TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.			Kinerja	Rp.
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		2.19.03.2.02.01.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	multi event								1	2.523.100,300	0	1.831.925,212	0	1.831.861,607	1	6.186.887,119				
				Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan multi event dan single event Tingkat Kabupaten/Kota***	dokumen								0		1		2		3					
		2.19.03.2.02.03.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah kejuaraan olahraga yang diikuti	multi event								0	0	0	45.000,000	0	45.000,000	0	90.000,000				
				Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan**	orang								0		30		30		60					
		2.19.03.2.05.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan	jenis								4	226.698,050	4	265.619,176	4	255.619,607	12	747.936,833				
		2.19.03.2.05.01.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan olahraga rekreasi	kegiatan								14	226.698,050	0	265.619,176	0	255.619,607	14	747.936,833				
				Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi***	dokumen								0		15		15		30					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																								
		2.22.02.	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	budaya								23	313,603,450	25	779,887,042	27	814,171,510	27	1,907,662,002				
		2.22.02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni budaya yang aktif	kelompok budaya								0	0	16	389,944,000	16	407,085,756	32	797,029,756				
		2.22.02.2.01.02.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah pembinaan dan pengembangan seni budaya	kegiatan								0	0	0	389,944,000	0	407,085,756	0	797,029,756				
				Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan***	orang								0		280		280		560					
		2.22.02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah adat tradisional yang dilestarikan	adat tradisional								5	313,603,450	5	389,943,042	5	407,085,754	15	1,110,632,246				
		2.22.02.2.02.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah event budaya yang dilaksanakan	kegiatan								6	313,603,450	0	389,943,042	0	407,085,754	6	1,110,632,246				
				Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan***	objek								0		10		12		22					
		2.22.03.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah tradisi budaya yang dibina	tradisi budaya								5	106,085,620	7	347,964,127	9	363,260,913	9	817,310,660				
		2.22.03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah seniman / pelaku seni yang aktif	kelompok seni								4	106,085,620	14	347,964,127	12	363,260,913	30	817,310,660				
		2.22.03.2.01.01.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah event seni budaya yang diikuti	kegiatan								2	106,085,620	0	347,964,127	0	363,260,913	2	817,310,660				
				Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)***	orang								0		70		70		140					
		2.22.05.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%								75.00	616,280,600	87.50	439,223,069	100.00	458,531,672	100.00	1,514,035,341				
		2.22.05.2.02.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah situs / cagar budaya yang dilestarikan	situs								6	616,280,600	4	439,223,069	5	458,531,672	5	1,514,035,341				
		2.22.05.2.02.01.	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah peningkatan pelestarian situs / cagar budaya	paket								3	616,280,600	0	439,223,069	0	458,531,672	3	1,514,035,341				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TAHUN CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN								TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.			Kinerja	Rp.
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
				Jumlah situs / cagar budaya yang dilestarikan / dipelihara	paket								3		0		0		3					
				Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi***	objek								0		4		5		5					
		2.22.06.	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase benda cagar budaya yang dikelola museum	%								88.46	17,302,000	94.23	67,377,524	100	70,339,494	100.00	155,019,018				
		2.22.06.2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah benda cagar budaya (BCB) yang dikelola	buah								46	17,302,000	49	67,377,524	52	70,339,494	52	155,019,018				
		2.22.06.2.01.04.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah gedung museum yang dipelihara	unit								1	17,302,000	0	67,377,524	0	70,339,494	1	155,019,018				
				Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia dan terpelihara***	unit								0		1		1		1					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																								
	Meningkatnya sektor ekonomi kreatif			Persentase peningkatan produktivitas ekonomi kreatif	%								70.67		72.40		73.72		73.72					
		3.26.05.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata	%								220.00	198,958,189	37.50	479,800,995	38.18	500,893,437	38.18	1,179,652,621				
				Persentase pokdarwis aktif	%								54.29		91.67		100.00		100.00					
				Jumlah pelatihan keterampilan SDM pariwisata	pelatihan								1		2		3		6					
		3.26.05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku usaha yang kompeten dan mampu menggerakkan ekonomi kreatif	orang								386	198,958,189	200	479,800,995	225	500,893,437	225	1,179,652,621				
		3.26.05.2.01.01.	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang pariwisata yang berkembang	pelaku usaha								14	67,860,000	0	100,000,000	0	120,893,437	14	288,753,437				
				Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan kompetensinya***	orang								0		360		360		720					
		3.26.05.2.01.03.	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/ atau Siswa)	Jumlah SDM pariwisata yang kompeten dan berkualitas	orang								40	63,537,500	0	100,000,000	0	100,000,000	40	263,537,500				
				Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa)***	orang								0		80		100		180					
		3.26.05.2.01.06.	Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pariwisata yang kompeten dan bersertifikasi	orang bersertifikat								2	67,560,689	0	279,800,995	0	280,000,000	2	627,361,684				
				Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif***	orang								0		20		20		40					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan indikator. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dan target yang direncanakan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Khusus bagi Pemerintah Daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ada tiga aspek yang harus dicapai di era otonomi daerah yaitu ***Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing Daerah*** dan ***Pelayanan Umum***. Ketiga aspek tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah digunakan untuk menentukan Indikator Kinerja. Indikator kinerja Disporabudpar Kabupaten Sampang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang mengacu pada hasil penajaman indikator tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran P-RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Realisasi		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
IT.3	Pertumbuhan Ekonomi	4,44	4,76	-0,11	3,75	4,51	5,01	5,25	5,25
IS.9	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman	2,93	1,04	1,41	2,65	3,05	3,46	3,97	3,97

Sumber : Penajaman Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang, 2023

Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra Disporabudpar dengan P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA DISPORABUDPAR		SASARAN RENSTRA DISPORABUDPAR		Kondisi Awal (2018)	REALISASI		TARGET				Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PDRB sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman					2,93	1,04	1,41	2,65	3,05	3,46	3,97	3,97
		PDRB sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman			2,93	1,04	1,41	2,65	3,05	3,46	3,97	3,97
				Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan	Rata-rata lama tinggal	-	-	-	-	55,46	72,10	77,64	77,64
				Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	Persentase peningkatan produktivitas ekonomi kreatif	-	-	-	-	70,67	72,40	73,72	73,72

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2023

Tabel 7.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah PMDM 17 yang Diampu Perangkat Daerah yang Mendukung Pada Aspek-aspek P-RPJMD Tahun 2019-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi				Target Pada Perubahan RPJMD 2019-2024		Target Akhir Kinerja RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM									
II	Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
13	Kepemudaan dan Olahraga									
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan*	%	-	-	-	2,50	5,40	4,37	4,38	4,38
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri*	%	-	-	-	0,01	0,05	0,32	0,33	0,33
	Peningkatan prestasi olahraga*	medali emas	18	19	2	1	0	14	16	16
16	Kebudayaan									
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku / pendukung pertunjukan seni*	%	-	-	-	-	30,23	60	80	80
	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi*	unit	-	-	-	15	25	30	42	42
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni*	%	-	-	-	-	110,41	65	80	80
	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan*	unit	-	-	-	6	7	4	4	4
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku / pendukung pertunjukan seni*	%	-	-	-	-	30,23	60	80	80
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah*	%	-	-	-	15	40,40	70	80	80
	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)*	unit	-	-	-	15	40	70	80	80

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Realisasi				Target Pada Perubahan RPJMD 2019-2024		Target Akhir Kinerja RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya*	orang	-	-	-	-	5	8	12	12
	Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi*	orang	-	-	-	-	5	5	5	5
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni*	%	-	-	-	-	110,41	65	80	80
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah*	%	-	-	-	15	40,40	70	80	80
	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku / pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)*	%	-	-	-	-	0,57	60	30	30
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku / pendukung pertunjukan seni*	%	-	-	-	-	30,23	60	80	80
	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat*	%	-	-	-	59,96	93,49	80	90	90
III	Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan									
2	Pariwisata									
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	%	154,11	167,76	-93,28	103,71	95,67	78,99	79,01	79,01
	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif*	rupiah	-	-	2.543.750	-	6.393.939,45	2.750.000	3.000.000	3.000.000
	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara*	orang	314,552	842.241	56.633	115.369	225.737	319.588	572.102	572.102
	Kontribusi PDB Pariwisata*	%	27,37	15,34	27,37	0,49	0,49	15,34	27,37	27,37

Sumber : Disporabudpar Kabupaten Sampang, 2023

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Perubahan Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Renstra Tahun 2019-2024 yaitu pengendalian dan evaluasi atas target-target sasaran dalam perubahan RPJMD masih belum optimal, koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang Disporabudpar Kabupaten Sampang masih belum optimal, SDM pada Disporabudpar Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih sangat terbatas, usulan program dan kegiatan belum terakomodir secara maksimal.

Tantangan yang diuraikan di atas memerlukan tekad dan langkah besar dalam memperbaiki kondisi dan permasalahan yang terprogram dan berkesinambungan pada jangka waktu 2 (dua) tahun ke depan dalam bentuk dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dan berkualitas.

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Disporabudpar Kabupaten Sampang untuk mencapai kondisi yang diharapkan sesuai dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024 sangat tergantung pada integrasi yang komprehensif terhadap potensi, peluang dan hambatan yang dimiliki serta konsistensi dalam pelaksanaan dan peran aktif masyarakat dan stakeholder yang didasari sikap mental, tekad, semangat serta ketaatan dan disiplin aparatur.

Selanjutnya dokumen Perubahan Renstra ini dijadikan acuan Disporabudpar Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolak ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Disporabudpar Kabupaten Sampang dalam kurun waktu dua tahun.

Diharapkan Perubahan Renstra Disporabudpar Kabupaten Sampang ini bermanfaat di dalam melaksanakan rencana pembangunan tahunan, untuk mendukung proses pelaksanaan Rencana Pembangunan yang lebih baik.

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI



LAMPIRAN

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019 - 2024**

**CASCADING RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022 - 2024**

Mendukung Misi : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif
 Tujuan RPJMD : Meningkatkan Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Perdesaan melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 Sasaran RPJMD : Meningkatkan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
1 PDRB sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1 Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman	1 Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan	1 Rata-rata lama tinggal	1 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1 Jumlah obyek destinasi wisata	1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	1 Jumlah daya tarik destinasi wisata yang layak jual	1 Perencanaan Pengembangan DayaTarik Wisata Kabupaten / Kota	1 Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/ Kota
				2 Pemasaran Pariwisata		1 Jumlah event pariwisata yang diselenggarakan	2 Jumlah dokumen perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/ Kota***		
						2 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	1 Jumlah destinasi wisata dikelola	1 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	1 Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan
								2 Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	1 Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)***
									2 Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota yang tersedia dan terpelihara***
								3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	1 Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara***
									1 Jumlah pengelola destinasi wisata yang kompeten
									2 Jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota***
									1 Jumlah promosi destinasi, potensi dan atraksi wisata yang dilaksanakan
									2 Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri***

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
								2 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten / Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Jumlah data dan informasi yang dicetak offline 2 Jumlah data dan informasi yang terbit online 3 Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota, baik dalam dan luar negeri***
								3 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Jumlah mitra pelaku promosi wisata 2 Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri***
				3 Pengembangan Kebudayaan	1 Jumlah budaya daerah yang dilestarikan	1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	1 Jumlah kelompok seni budaya yang aktif	1 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 Jumlah pembinaan dan pengembangan seni budaya 2 Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan***
						2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	1 Jumlah adat tradisional yang dilestarikan	1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1 Jumlah event budaya yang dilaksanakan 2 Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan***
				4 Pengembangan Kesenian Tradisional	1 Jumlah tradisi budaya yang dibina	1 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	1 Jumlah seniman / pelaku seni yang aktif	1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1 Jumlah event seni budaya yang diikuti 2 Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)***
				5 Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1 Persentase cagar budaya yang dilestarikan	1 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	1 Jumlah situs / cagar budaya yang dilestarikan	1 Pelindungan Cagar Budaya	1 Jumlah peningkatan pelestarian situs / cagar budaya 2 Jumlah situs / cagar budaya yang dilestarikan / dipelihara 3 Jumlah objek cagar budaya yang dilindungi***
				6 Pengelolaan Permuseuman	1 Persentase benda cagar budaya yang dikelola museum	1 Pengelolaan Museum Kabupaten / Kota	1 Jumlah benda cagar budaya (BCB) yang dikelola	1 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	1 Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana museum 2 Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia dan terpelihara***

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
				7 Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1 Jumlah organisasi kepemudaan aktif 2 Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional	1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Organisasi terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	1 Jumlah pemuda yang dibina dalam pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kader pemuda	1 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan / atau Berprestasi	1 Jumlah duta pemuda JPD 2 Jumlah kader pemuda yang mengikuti lomba foto essay 3 Jumlah pemuda yang mengikuti pameran karya pemuda 4 Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi kapal pemuda nusantara dan pertukaran pemuda antar provinsi 5 Jumlah pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi penerima penghargaan***
								2 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1 Jumlah pemuda pelopor 2 Jumlah peserta diklat dasar kepemimpinan 3 Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan***
						2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	1 Jumlah organisasi kepemudaan yang telah difasilitasi untuk peningkatan kapasitas pemuda	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	1 Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan dan memperoleh fasilitasi akses permodalan 2 Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha***
								2 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	1 Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan dan pelatihan drumband 2 Jumlah pemuda yang difasilitasi pada penyelenggaraan kreatifitas pemuda 3 Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina 4 Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan***
				8 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1 Jumlah prestasi olah raga tingkat regional, nasional dan internasional	1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	1 Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang mendukung peningkatan prestasi olahraga	1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota	1 Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun 2 Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara 3 Jumlah sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan***

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
						2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	1 Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten / Kota	1 Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan 2 Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan multi event dan single event Tingkat Kabupaten/Kota***
								2 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1 Jumlah kejuaraan olahraga yang diikuti 2 Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan***
						3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1 Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan	1 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Jumlah kegiatan olahraga 2 Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi***
		2 Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	1 Persentase peningkatan produktivitas ekonomi kreatif	1 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata 2 Persentase pokdarwis aktif 3 Jumlah pelatihan keterampilan SDM pariwisata	1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1 Jumlah pelaku usaha yang kompeten dan mampu menggerakkan ekonomi kreatif	1 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1 Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang pariwisata yang berkembang 2 Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan kompetensinya***
								2 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan / atau Siswa)	1 Jumlah SDM pariwisata yang kompeten dan berkualitas 2 Jumlah orang yang mengikuti pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa)***
								3 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	1 Jumlah SDM pariwisata yang kompeten dan bersertifikasi 2 Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif***

**FORMAT PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SESUAI PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019**

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										KETERANGAN					
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				18			
DISPORABUDPAR	2.13.2.13.01.15.	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan aktif	90.32	%					Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan aktif	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	19						
					Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional	13	pemuda						Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional										
	2.13.2.13.01.15.01.			Pembinaan dan peningkatan kapasitas pemuda	Sosialisasi pencegahan narkoba dikalangan remaja	160 remaja (Napza), 26 OKP, 90 pemuda	remaja, OKP, pemuda																Tidak ada sub kegiatan yang relevan dengan Permendagri 90
					Jumlah kader pemuda yang mengikuti lomba foto essay			Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	Jumlah kader pemuda yang mengikuti lomba foto essay	Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang dibina dalam pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kader pemuda	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional			2	19	2	2.01	7			
					Seleksi kapal pemuda nusantara dan pertukaran pemuda antar propinsi			Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi kapal pemuda nusantara dan pertukaran pemuda antar provinsi	Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang dibina dalam pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kader pemuda	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional			2	19	2	2.01	7			
					Duta pemuda JPD			Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	Jumlah duta pemuda JPD	Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang dibina dalam pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kader pemuda	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional			2	19	2	2.01	7			
					Pembinaan organisasi kepemudaan			Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang telah difasilitasi untuk peningkatan kapasitas pemuda	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan aktif			2	19	2	2.02	2			
	2.13.2.13.01.15.02.			Pemberdayaan dan peningkatan kreativitas Pemuda	Jumlah peserta diklat dasar kepemimpinan	194	pemuda	Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda	Jumlah peserta diklat dasar kepemimpinan	Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang dibina dalam pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kader pemuda	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional			2	19	02	2.01	08			
					Jumlah pemuda pelopor			Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda	Jumlah pemuda pelopor	Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang dibina dalam pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kader pemuda	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional			2	19	02	2.01	08			

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										KETERANGAN					
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18	
					Jumlah pemuda yang difasilitasi pada penyelenggaraan kreatifitas pemuda			Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang difasilitasi pada penyelenggaraan kreatifitas pemuda	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang telah difasilitasi untuk peningkatan kapasitas pemuda	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan aktif				2	19	2	2.02	2		
					Drumband			Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan dan pelatihan drumband	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang telah difasilitasi untuk peningkatan kapasitas pemuda	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan aktif				2	19	2	2.02	2		
	2.13.2.13.01.15.03.			Pengembangan kapasitas pemuda	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan dan memperoleh fasilitasi akses permodalan	87	wirausaha	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan dan memperoleh fasilitasi akses permodalan	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang telah difasilitasi untuk peningkatan kapasitas pemuda	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan aktif				2	19	02	2.02	01		
					Pameran prestasi karya pemuda			Pemberian penghargaan kepada pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi	Jumlah pemuda yang mengikuti pameran karya pemuda	Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang dibina dalam pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kader pemuda	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional				2	19	2	2.01	7		
					Sarana dan prasarana kepemudaan			Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan Kab/Kota	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan	Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang dibina dalam pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kader pemuda	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan aktif				2	19	2	2.01	6		
													Jumlah pemuda yang berprestasi tingkat regional, nasional dan internasional										
	2.13.2.13.01.16.			Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Jumlah prestasi olah raga tingkat regional, nasional dan internasional	84	prestasi						Jumlah prestasi olah raga tingkat regional, nasional dan internasional										
	2.13.2.13.01.16.01.			Pembinaan olahraga prestasi	Kompetisi olahraga Jenjang SD, SMP & SMA/SMK Tingkat Kab & Provinsi	19	cabor	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah prestasi olah raga tingkat regional, nasional dan internasional				2	19	03	2.02	01		
					Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan				Jumlah kejuaraan olahraga yang diikuti	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah prestasi olah raga tingkat regional, nasional dan internasional				2	19	03	2.02	03		
					Diklat tentang perwasitan dan kepelatihan	100	peserta															Tidak ada sub kegiatan yang relevan dengan Permendagri 90	
					Pembinaan usia dini	40	peserta	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan dan diikuti	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah prestasi olah raga tingkat regional, nasional dan internasional				2	19	03	2.02	01		
	2.13.2.13.01.16.02.			Pembinaan olahraga rekreasi	Jumlah kegiatan olahraga	12	kegiatan	Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasan festival dan olahraga rekreasi	Jumlah kegiatan olahraga	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah prestasi olah raga tingkat regional, nasional dan internasional				2	19	03	2.05	01		
	2.13.2.13.01.16.03.			Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	Terbangunnya sarana dan prasarana olahraga yang dapat mendukung peningkatan prestasi olahraga	3	paket	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang mendukung peningkatan prestasi olahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah prestasi olah raga tingkat regional, nasional dan internasional				2	19	03	2.01	03		
					Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga yang layak pakai	10	unit	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang mendukung peningkatan prestasi olahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Jumlah prestasi olah raga tingkat regional, nasional dan internasional				2	19	03	2.01	03		

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										KETERANGAN				
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18	
	2.16.2.13.01.15.15.02.	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	KEBUDAYAAN	Program pengelolaan budaya daerah	Persentase kelompok budaya daerah yang aktif	53.96	%								Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	22					
	2.16.2.13.01.15.02.			Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan	Tersedianya pemeliharaan serta pelestarian situs benda cagar budaya	7	paket	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah pembangunan pelestarian situs / cagar budaya	Pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah situs / cagar budaya yang dilestarikan	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase kelompok budaya daerah yang aktif			2	22	05	2.02	01		
								Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah situs / cagar budaya yang dilestarikan / dipelihara		Jumlah situs / cagar budaya yang dilestarikan											
								Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana museum	Pengelolaan museum Kabupaten/Kota	Jumlah benda cagar budaya (BCB) yang dikelola	Program pengelolaan permuseuman	Persentase kelompok budaya daerah yang aktif			2	22	06	2.01	04		
	2.16.2.13.01.15.03.			Pengembangan seni dan budaya daerah	Aubade	5	kegiatan	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan	Jumlah pembinaan dan pengembangan seni budaya	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni budaya yang aktif	Program pengembangan kebudayaan	Persentase kelompok budaya daerah yang aktif			2	22	02	2.01	02		
					Festival Kesenian Pesisir Utara			Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah event seni budaya yang diikuti	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seniman / pelaku seni yang aktif	Program pengembangan kebudayaan	Persentase kelompok budaya daerah yang aktif			2	22	03	2.01	01		
					Festival Karya Tari Daerah			Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah event seni budaya yang diikuti	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seniman / pelaku seni yang aktif	Program pengembangan kebudayaan	Persentase kelompok budaya daerah yang aktif			2	22	03	2.01	01		
					Festival Sampang Tempo Doeloe			Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah pembinaan dan pengembangan seni budaya	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni budaya yang aktif	Program pengembangan kebudayaan	Persentase kelompok budaya daerah yang aktif			2	22	02	2.01	02		
	2.16.2.13.01.15.04.			Pembinaan dan pelestarian sejarah lokal dan nilai adat istiadat tradisional	Rangkaian peringatan Hari Jadi Sampang ke 397 : A. Ziarah Makam Leluhur, B. Pawai Budaya, C. Resepsi	4	kegiatan	Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Jumlah event budaya yang dilaksanakan	Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah adat tradisional yang dilestarikan	Program pengembangan kebudayaan	Persentase kelompok budaya daerah yang aktif			2	22	02	2.02	01		
					Festival Musik Tradisional			Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan	Jumlah event budaya yang dilaksanakan	Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah adat tradisional yang dilestarikan	Program pengembangan kebudayaan	Persentase kelompok budaya daerah yang aktif			2	22	02	2.02	01		
	3.02.2.13.01.15.	Urusan pemerintahan pilihan	PARIWISATA	Program Pengembangan Pariwisata Daerah	Persentase pokdarwis aktif	62.5	%						Persentase pokdarwis aktif	PARIWISATA	Urusan pemerintahan pilihan	3	26					
					Jumlah obyek destinasi tujuan wisata (ODTW) baru	23	destinasi						Jumlah obyek destinasi tujuan wisata (ODTW) baru									
					Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata	31.82	%						Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata									
	3.02.2.13.01.15.03.			Pemasaran dan informasi wisata	Terpromosikannya destinasi, potensi wisata dan atraksi wisata Kab. Sampang dan tersedianya informasi pendukung wisata	11	kegiatan	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi destinasi, potensi dan atraksi wisata yang dilaksanakan	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisata	Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata			3	26	03	2.01	02		
								Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri	Jumlah data dan informasi yang dicetak offline	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisata	Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata			3	26	03	2.01	03		
								Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri	Jumlah data dan informasi yang terbit online	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisata	Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata			3	26	03	2.01	03		
								Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah mitra pelaku promosi wisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisata	Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata			3	26	03	2.01	04		
	3.02.2.13.01.15.04.			Pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata	Destinasi wisata yang layak jual	23	destinasi	Perencanaan pengembangan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik destinasi wisata yang dikembangkan	Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik destinasi wisata yang layak jual	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah obyek destinasi tujuan wisata (ODTW) baru			3	26	02	2.01	02		

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										KETERANGAN					
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18	
								Pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang layak jual	Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata dikelola	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah obyek destinasi tujuan wisata (ODTW) baru				3	26	02	2.03	03		
				Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata		6	paket	Pengadaan/pemeliharaan/r ehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah potensi wisata yang dikembangkan	Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata dikelola	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah obyek destinasi tujuan wisata (ODTW) baru				3	26	02	2.03	04		
								Pengadaan/pemeliharaan/r ehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah potensi wisata yang layak jual	Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata dikelola	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah obyek destinasi tujuan wisata (ODTW) baru				3	26	02	2.03	04		
								Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola destinasi wisata yang kompeten	Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi wisata yang layak jual	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah obyek destinasi tujuan wisata (ODTW) baru				3	26	02	2.03	06		
	3.02.2.13.01.15.05.			Pengembangan SDM dan usaha pariwisata	SDM pariwisata yang berkualitas dan usaha pariwisata yang terstandar	7	kegiatan	Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang pariwisata yang berkembang	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku usaha yang kompeten dan mampu menggerakkan ekonomi kreatif	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pokdarwis aktif				3	26	05	2.01	01		
													Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata										
								Pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah SDM pariwisata yang kompeten dan berkualitas	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku usaha yang kompeten dan mampu menggerakkan ekonomi kreatif	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pokdarwis aktif				3	26	05	2.01	03		
													Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata										
								Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Jumlah SDM pariwisata yang kompeten dan bersertifikasi	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pelaku usaha yang kompeten dan mampu menggerakkan ekonomi kreatif	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pokdarwis aktif				3	26	05	2.01	06		
													Persentase pertumbuhan pelaku usaha wisata										
	2.13.2.13.01.01.	PENUNJANG ADMINISTRASI	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	%						Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PENUNJANG ADMINISTRASI		2	19					
	2.13.2.13.01.01.01.			Pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Jumlah surat terkirim	1000	surat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipenuhi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				2	19	01	2.08	01		
					Jumlah pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	12	bulan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipenuhi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				2	19	01	2.08	02		
					Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	28	unit	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				2	19	01	2.09	02		
					Jumlah tenaga kebersihan	72	ob	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga kebersihan	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipenuhi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				2	19	01	2.08	04		
					Jumlah pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	36	exs	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	Administrasi umum Perangkat Daerah	Cakupan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				2	19	01	2.06	06		
					Jumlah pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman rapat	750	ob	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	Administrasi umum Perangkat Daerah	Cakupan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				2	19	01	2.06	09		
								Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman tamu	Administrasi umum Perangkat Daerah	Cakupan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				2	19	01	2.06	08		
					Jumlah tenaga kontrak daerah	126	ob	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji PNS yang dibayar	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu				2	19	01	2.02	01		

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									KETERANGAN					
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17				
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah TPP yang dibayar	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu				2	19	01	2.02	01	
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah honor Kontrak Daerah	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu				2	19	01	2.02	01	
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran honor PP.Kom/KPA/ Bendahara/PPK SKPD/ PPTK /Pengurus Barang/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa/PPHP	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu				2	19	01	2.02	01	
	2.13.2.13.01.01.02.			Penyediaan sarana administrasi perkantoran	Jumlah ATK	700	buah	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah ATK	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu				2	19	01	2.02	02	
					Jumlah barang cetakan	450	buah	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan	Administrasi umum Perangkat Daerah	Cakupan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				2	19	01	2.06	05	
					Jumlah barang pengadaan	101000	lembar	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang pengadaan	Administrasi umum Perangkat Daerah	Cakupan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				2	19	01	2.06	05	
					Jumlah komponen instalasi listrik	175	buah	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Administrasi umum Perangkat Daerah	Cakupan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				2	19	01	2.06	01	
					Jumlah alat kebersihan yang disediakan	200	buah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	Administrasi umum Perangkat Daerah	Cakupan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				2	19	01	2.06	02	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	16	ok	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dalam daerah	Administrasi umum Perangkat Daerah	Cakupan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				2	19	01	2.06	09	
					Jumlah koordinasi luar daerah	70	ok	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi luar daerah	Administrasi umum Perangkat Daerah	Cakupan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				2	19	01	2.06	09	
	2.13.2.13.01.02.			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	%						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik									
	2.13.2.13.01.02.01.			Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0	unit	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				2	19	01	2.07	09	
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	unit	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				2	19	01	2.09	09	
	2.13.2.13.01.02.03.			Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan	0	unit	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				2	19	01	2.07	02	
					Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan	0	unit	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				2	19	01	2.07	02	
					Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara	4	unit	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				2	19	01	2.09	02	
	2.13.2.13.01.02.04.			Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	5	unit	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				2	19	01	2.07	06	
								Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebel	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				2	19	01	2.07	05	
					Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	88	unit	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				2	19	01	2.07	06	
								Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				2	19	01	2.09	05	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										KETERANGAN				
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18
					Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	20	unit	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				2	19	01	2.07	06	
					Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	20	buah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	Administrasi umum Perangkat Daerah	Cakupan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik				2	19	01	2.06	02	
	2.13.2.13.01.03.			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100	%						Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur									
	2.13.2.13.01.03.01.			Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/sosialisasi /seminar	5	ASN	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi /seminar	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur				2	19	01	2.05	10	
								Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur				2	19	01	2.05	11	
	2.13.2.13.01.04.			Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu	100	%						Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu									
	2.13.2.13.01.04.01.			Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/Non Fisik, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Akhir Tahun, CALK, LKJIP	6	dok	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu				2	19	01	2.02	05	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran/ prognosis	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu				2	19	01	2.02	07	
	2.13.2.13.01.04.02.			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	4	dok	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Renstra / Renja SKPD	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu				2	19	01	2.01	01	
								Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah penyusunan dokumen RKA SKPD	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu				2	19	01	2.01	02	
								Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu				2	19	01	2.01	03	
								Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah penyusunan dokumen DPA SKPD	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu				2	19	01	2.01	04	
								Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu				2	19	01	2.01	05	
								Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan LPPD,LKPI, LKJIP dan SAKIP OPD	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu				2	19	01	2.01	07	
	2.13.2.13.01.04.03.			Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen SKM dan tata laksana	1	dok	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah dokumen SKM	Penataan Organisasi	Cakupan pelayanan penataan organisasi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				2	19	01	2.13	02	
					Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	2	kali	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	Penataan Organisasi	Cakupan pelayanan penataan organisasi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				2	19	01	2.13	02	

STRUKTUR ORGANISASI	RENSTRA/RENJA PD							PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								KETERANGAN	
	KODE	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021	SATUAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN		KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Cara Pengisian :

Kolom 1 : Diisi Struktur Organisasi/Unit Penanggung Jawab

Kolom 2-8 : Diisi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Kolom 9 : Diisi dengan sub kegiatan Permendagri 90 yang sekiranya sesuai (secara substansi) dengan indikator kegiatan Renja PD Tahun 2021 pada kolom 6

Kolom 10 : Diisi sama dengan kolom 6

Kolom 11 : Kegiatan mengikuti Sub Kegiatan pada Permendagri 90 Tahun 2019. Sub Kegiatan tersebut terletak pada kegiatan apa.

Kolom 12 : Diisi sama dengan kolom 6 atau 10

Kolom 13 : Program mengikuti Sub Kegiatan pada Permendagri 90 Tahun 2019. Sub Kegiatan tersebut terletak pada kegiatan dan program apa.

Kolom 14 : Indikator Program diisi sama dengan kolom 6 atau 10

Kolom 15-17 : Diisi Bidang Urusan, Urusan dan Kode sesuai Permendagri 90 Tahun 2019

Kolom 16 : Diisi keterangan **apabila** terdapat indikator yang tidak dapat disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019